



LAPORAN KEGIATAN

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND COVID-19 PANDEMIC: ROAD TO INDONESIA VOLUNTARY NATIONAL REVIEW 2021

Bogor - Indonesia
1 April 2021



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN PELAKSANAAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOCUS GROUP DISCUSSION

***ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND COVID-19 PANDEMIC: ROAD
TO INDONESIA VOLUNTARY NATIONAL REVIEW 2021***

1 April 2021

Bogor – Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global penting untuk mengakhiri kemiskinan dan membawa dunia ke jalur yang berkelanjutan untuk mencapai pembangunan inklusif. Agenda ini didukung oleh para pemimpin pemerintahan pada pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa pada September 2015. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 169 target-target untuk dilaksanakan merupakan inti dari agenda ambisius ini.

TPB dimaksudkan untuk memfokuskan dan mengkoordinasikan kebijakan- kebijakan nasional menuju visi bersama untuk kemanusiaan. TPB dibangun berdasarkan upaya-upaya di masa lampau untuk melaksanakan agenda pengentasan kemiskinan yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Tujuan-tujuan ini memiliki aspirasi untuk

mewujudkan hak asasi manusia untuk semua dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak-anak perempuan.

Tujuan-tujuan ini meliputi tiga pila pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Walaupun TPB tidak mengikat secara hukum, pemerintah-pemerintah telah memberikan komitmen moral mereka untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini dengan menggunakan kapasitas terbaik mereka dan sejalan dengan prioritas-prioritas nasional mereka.

Agenda 2030 dan TPB-nya merupakan hasil dari konsultasi dan negosiasi Panjang selama beberapa tahun. IPU, UNDP, parlemen nasional dan ratusan anggota parlemen memainkan peran yang sangat aktif di sepanjang proses ini dan advokasi secara kuat untuk dimasukkannya tujuan-tujuan yang terkait dengan tata pemerintahan demokratis.

Tujuan dari perangkat penilaian mandiri ini adalah untuk membantu parlemen dan anggota parlemen untuk:

- Menilai kesiapan mereka mengenai keterlibatan dalam TPB.
- Mengidentifikasi strategi-strategi, mekanisme-mekanisme dan kemitraan - kemitraan tambahan untuk mendukung pelaksanaan TPB secara lebih efektif.

Perangkat ini dirancang untuk memungkinkan anggota parlemen untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik, kesenjangan, kesempatan dan pembelajaran. Yang akan mempersiapkan anggota parlemen untuk secara efektif melembagakan agenda baru ini dan mengarusutamakan berbagai tujuan ke dalam proses legislatif. Perangkat ini bukanlah merupakan suatu resep baku. perangkat ini dirancang agar relevan bagi semua parlemen apapun sistem politik dan tahapan pembangunan mereka.

Penilaian mandiri adalah suatu metode yang dapat digunakan oleh parlemen untuk memulai proses benchmarking internal mereka dan untuk menilai kesiapan keterlibatan mereka dalam TPB. Kesimpulan dari penilaian mandiri seharusnya memungkinkan parlemen untuk menetapkan prioritas untuk reformasi dalam rangka memperkuat responnya terhadap TPB. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa parlemen siap untuk memainkan peran penuh dalam mewujudkan Agenda 2030.

B. SUSUNAN DELEGASI

NO	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI/ KOMISI	JABATAN
1	Dr.H.Fadli Zon, S.S., M.Sc.	A-86	P. Gerindra / Komisi I	Ketua BKSAP / Watua Panja
2	Dr.Sihar P.H. Sitorus,BSBA.,MBA.	A-139	PDI Perjuangan / Komisi XI	Ketua Panja / Watua BKSAP
3	Ir. H. A. Hafisz Tohir	A-487	PAN / Komisi XI	Watua Panja / Watua BKSAP
4	Ir. Effendy Sianipar	A-144	PDI Perjuangan / Komisi IV	Anggota Panja
5	H. Naszirul Falah Amru, S.E.	A-223	PDI Perjuangan / Komisi VII	Anggota Panja
6	Dr. Sofyan Tan	A-137	PDI Perjuangan / Komisi X	Anggota Panja
7	Irine Yusiana Roba Putri, S. Sos, Mcomn&Mediast	A-262	PDI Perjuangan / Komisi I	Anggota Panja
8	Puteri Anetta Komarudin	A-295	P. Golkar / Komisi XI	Anggota Panja
9	H.Singgih Januratomoko,S.K.H.,M.M.	A-305	P. Golkar / Komisi VI	Anggota Panja
10	Ichsan Firdaus	A-292	P. Golkar / Komisi IV	Anggota Panja
11	Rachel Maryam Sayidina	A-81	P. Gerindra / Komisi I	Anggota Panja
12	Ratih Megasari Singkaru, M.Sc	A-402	P. Nasdem / Komisi X	Anggota Panja
13	H. Syaikhul Islam, Lc, M.Sosio	A-31	PKB / Komisi VII	Anggota Panja
14	Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.Ap	A-32	PKB / Komisi IX	Anggota Panja
15	Heru Widodo, S.Psi.	A-55	PKB / Komisi III	Anggota Panja
16	Muslim, Shi.Mm	A-523	P. Demokrat / Komisi IV	Anggota Panja

17	Hj. Sakinah Al Jufri, S.Ag	A-456	PKS / Komisi X	Anggota Panja
18	Ema Ummyatul Chusnah	A-471	PPP / Komisi IV	Anggota Panja
19	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.	A-517	PAN / Komisi VII	Anggota Panja

C. VISI DAN MISI DELEGASI

- Mendapatkan gambaran besar terkait pelaksanaan penilaian mandiri terkait SDGs dan kaitannya dengan peloran Voluntary National Review (VNR) oleh pemerintah pada akhir tahun ini.
- Memberikan pandangan / sudut pandang parlemen terkait VNR yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Pimpinan dan Anggota BKSAP diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa Pidato dan Saran Butir Wicara.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

12.00 - 13.30	Makan Siang di Restoran Hotel
14.00 – 14.05	Pembukaan oleh Moderator, Dr. Sihar Sitorus (Ketua Panja TPB/SDGs) BKSAP
14.05 – 14.15	Kata sambutan oleh Dr. Fadli Zon , Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI
14.15 – 14.50	Paparan oleh Panelis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MS.c. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS 2. Hari Prabowo, Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri RI

14.50 – 15.20	<p>Presentasi oleh Isabel Obadiaru, IPU SDG Project Officer Consultant on Inter-Parliamentary Union (IPU):</p> <p>“Pengantar mengenai peran parlemen dalam implementasi dan pengawasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Presentasi mengenai Perangkat Penilaian Mandiri TPB bagi Parlemen.”</p> <p><i>(Introduction to the role of the parliaments in implementing and monitoring the SDGs. Presenting IPU-UNDP SDG Self-Assessment Toolkit for Parliaments)</i></p>
15.20 – 15.50	Sesi Tanya Jawab
15.50 – 16.00	Kesimpulan dan kata penutup oleh Moderator Dr. Sihar Sitorus (Ketua Panja TPB/SDGs) BKSAP

B. SITUASI UMUM

1. Opening by Moderator – Dr. Sihar Sitorus, Ketua Panja TPB/SDGs, Wakil Ketua BKSAP

17 agenda Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang harus dicapai. Pencapaian 17 goals tersebut dapat dicapai sesuai dengan konteks masing-masing negara dengan kemajuan yang berbeda satu sama lain. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific UN ESCAP menekankan dalam webinar yang diselenggarakan mengenai pentingnya peran para anggota parlemen dalam mengatasi pandemi Covid-19. Dalam webinar tersebut disampaikan bahwa banyak tujuan yang terhambat karena pandemi ini. Fokus lainnya yang juga disampaikan adalah pentingnya untuk secara rutin terlibat dalam penyusunan Voluntary National Review (VNR) untuk mengetahui pencapaian tujuan-tujuan SDGs di Indonesia. Bentuk keseriusan lainnya dalam pencapaian Agenda 2030 adalah dengan dimasukkannya tujuan-tujuan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Parlemen juga harus mendukung VNR dengan fungsi anggarannya. Panitia Kerja SDGs berkoordinasi secara berkala dengan para pemangku

kepentingan dan juga melakukan beberapa kegiatan terkait SDGs dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai komitmen untuk membantu pemerintah mencapai kemajuan SDGs. Toolkits yang disusun oleh IPU juga dimaksudkan sebagai alat untuk membantu kita mencapai SDGs.



**Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP dan Ketua Panja SDGs
menjadi narasumber**

2. Kata Sambutan oleh Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP

Ketua BKSAP menekankan pentingnya akuntabilitas dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan SDGs untuk menjaga inklusivitas. Beliau juga menekankan untuk selalu berpegang pada prinsip “*leave no one behind*” dalam upaya mencapai agenda 2030 ini. Webinar ini juga akan mengangkat isu terkait VNR yang akan diajukan oleh DPR-RI dalam sidang United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) tahun ini. Parlemen dapat bersuara untuk menilai dan menentukan sejauh mana kemajuan pencapaian SDGs di Indonesia. Ketua BKSAP mengharapkan agar kondisi dan pencapaian Indonesia bisa lebih baik lagi. Panitia Kerja SDGs dibentuk sebagai cara

untuk mengakselerasi pencapaian SDGs di tingkat nasional. Terutama di masa pandemi ini.



Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP memberikan kata sambutan

3. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS

Agenda 2030 bisa dikatakan sesuai dengan tujuan bernegara Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kelima prinsip SDGs, yaitu 5P yang dijabarkan menjadi *People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships*, yang juga merupakan tujuan yang diajukan oleh para pendiri bangsa. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyusun peta jalan untuk menjadi panduan dalam menyusun rencana aksi yang dapat dijalankan secara nasional melalui Rencana Aksi Nasional 2017-2019. Sebagai tindak lanjut di tingkat daerah, 29 provinsi sudah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Bappenas juga sudah menyusun VNR 2017-2019 sebagai wujud keseriusan dan komitmen pemerintah dalam mencapai Agenda 2030.

Upaya pencapaian SDGs melibatkan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Amil Zakat Nasional, kelompok-kelompok filantropis, SDGs Academy yang telah dibentuk di 21 perguruan tinggi, lembaga privat seperti perusahaan-perusahaan juga telah melaporkan berbagai upaya dan pencapaiannya terkait ini.

7 agenda menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), karakter bangsa, wilayah, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sebagainya sesuai dengan dengan indikator-indikator SDGs. Dari sekian banyak indikator, 23 menunjukkan perbaikan, tetapi harus juga diakui banyak indikator yang perlu ditingkatkan. 146 indikator tercapai, 50 % membaik, dan 84 indikator perlu upaya lebih baik lagi untuk mencapainya. Fokus pada SDM berkualitas, goal 1, angka kemiskinan pernah mencapai angka 1 digit sebelum pandemi tetapi pada tahun 2020 naik lagi karena pandemi. Akses kepada layanan pendidikan dilaporkan meningkat, tapi kualitas dan fasilitas perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan antara lain:

- Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ekonomi yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran menurun.
- Pengguna internet juga dilaporkan meningkat, yang dapat menjadi salah satu indikator membaiknya akses masyarakat terhadap informasi.
- Pengembangan wilayah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan, kesenjangan antar wilayah mengalami penurunan, dan jumlah desa dengan kategori berkembang terus meningkat.
- Akses Rumah Tinggal layak terus meningkat meningkat.
- Panjang jalan nasional yang menjadi penghubung ekonomi dan sosial masyarakat terus meningkat.
- Agenda stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan yang semakin meningkat, hanya saja akses kebebasan sipil terus mengalami penurunan.
- Penerimaan bantuan hukum pemerintah meningkat.
- Lingkungan hidup dan ketahanan bencana meningkat.
- Emisi gas rumah kaca menunjukkan penurunan dalam kuantitas di atmosfer.
- Proporsi tutupan hutan membaik.

Tantangan utama mencapai target SDGs:

- **SDM yang Melambatnya laju penurunan kemiskinan:**
 - Rendahnya ketahanan pangan dan gizi.
 - Terbatasnya akses air minum dan sanitasi.
 - Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan kompetensi tenaga kesehatan serta gaya hidup sehat.
 - Belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah dan pendidikan inklusif.
 - Belum seluruh guru memenuhi syarat sertifikasi, pengembangan kurikulum, akses internet dan media ajar.
 - Masih rendahnya kompetensi siswa untuk matematika dan membaca Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Karakter Bangsa.

- **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas**
Infrastruktur pengembangan ekonomi:
 - Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
 - Rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja, terutama untuk lapangan kerja formal.
 - *Mismatched* dalam pasar tenaga kerja.
 - Masih rendahnya kualitas investasi dan kapasitas inovasi untuk mendorong pertumbuhan industry.
 - Belum optimalnya proses transformasi ekonomi.
 - Belum terjangkaunya penyediaan layanan telekomunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat.

- **Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan:**
 - Laju penurunan rasio Gini masih lambat.
 - Masih rendahnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di perdesaan.
 - Masih rendahnya pertumbuhan sumber daya di luar Jawa.
 - Masih tingginya kesenjangan antarkelompok pendapatan, antara perkotaan dan perdesaan, antar wilayah.

- **Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
 - Belum optimalnya integrasi infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi pergerakan barang dan orang.
 - Belum optimalnya kehandalan pelayanan ketenagalistrikan.
 - Terbatasnya infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) middle dan last mile untuk menjangkau seluruh wilayah.
 - Terbatasnya kualitas pemanfaatan digitalisasi untuk penciptaan nilai tambah termasuk lapangan kerja untuk generasi muda.
 - Terbatasnya keamanan siber sejalan dengan diversifikasi pemanfaatan digitalisasi.

- **Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik:**
 - Pelayanan publik yang belum responsif dan optimal terhadap kebutuhan kelompok rentan.
 - Masih belum memadainya kapasitas dan persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi untuk melakukan bantuan hukum bagi orang dan kelompok miskin.
 - Masih relatif rendahnya keterwakilan perempuan yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif.

- **Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim:**
 - Terbatasnya akses pembiayaan perumahan
 - Kurangnya fasilitas pengangkutan dan pengolahan sampah
 - Rendahnya Perilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
 - Tingginya *food waste*
 - Rendahnya kualitas dan tata kelola penyediaan air bersih
 - Rendahnya manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
 - Masih adanya pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan, dan penambangan tanpa ijin
 - Ancaman kepunahan satwa langka

Beberapa resiko akibat Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian SDGs:

- **Risiko Ekonomi**

- Penurunan daya beli masyarakat. Adanya loss of income sebesar Rp 374,4 Triliun.
- Peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin meningkat 0,97 persen (yoy) menjadi 10,19 persen pada September 2020.
- Peningkatan angka pengangguran. 14,28% penduduk usia kerja terdampak COVID-19 dengan 2,56 juta orang menganggur.
- Peningkatan kesenjangan. Rasio Gini meningkat 0,005 (yoy) menjadi 0,385 pada September 2020.
- Kegiatan komersial menurun. Transportasi dan Pergudangan menurun pada Q4 - 13,42% (yoy). Penyediaan akomodasi makan dan minum Q2 -8,88% (yoy).

- **Risiko Sosial**

- Peningkatan risiko kekurangan gizi (wasting). 36% responden berkurang konsumsi pangannya akibat hambatan finansial.
- Pelayanan kesehatan esensial terkendala. 55% posyandu menunda layanan imunisasi dan 46% menunda layanan antenatal untuk ibu hamil.
- Penerapan PSBB dan transformasi sistem pendidikan “Pembelajaran Jarak Jauh” sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan dukungan teknologi untuk kualitas pembelajaran yang efektif. Keterbatasan akses internet pada siswa/mahasiswa di luar Pulau Jawa khususnya wilayah timur Indonesia. Kelompok siswa/mahasiswa miskin (20% terbawah) cenderung memiliki akses internet yang lebih rendah sebesar 38,46% dibanding kelompok kaya (20% teratas) sebesar 81,68%.

- **Risiko Lingkungan**

- Peningkatan timbulan sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Jumlah limbah medis dari Pandemi COVID-19 ini meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas.

- Peningkatan sampah plastik medis dan peralatan medis. Limbah medis yang dihasilkan Indonesia per hari sebanyak 294,66 ton.
- Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akibat berpindahnya pengguna transportasi umum. 88% angkutan umum perkotaan (MRT, LRT, TJ dan KRL) menurun dan 93% penumpang bus AKAP dan kereta api juga menurun.

Redesain Transformasi Ekonomi

Selama pandemic telah terjadi terjadi penurunan ekonomi. 76% tingkat utilisasi dan akan terus menurun. Daya beli masyarakat juga menurun akibat *loss income* yang terjadi. Target visi 2024 terganggu. Tanpa pandemic, diprediksi kita bisa keluar dari *middle income trap*, namun karena pandemi hal tersebut mundur menjadi 2043. Untuk menanggulangi permasalahan itu maka fokus pada beberapa aspek terkait transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dirancang antara lain:

- **SDM berdaya saing:**
 - Sistem Kesehatan
 - Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)
 - Riset dan Inovasi

- **Produktivitas Sektor Ekonomi:**
 - Industrialisasi
 - Produktivitas UMKM
 - Modernisasi Pertanian

- **Ekonomi Hijau:**
 - Ekonomi rendah karbon
 - *Blue Economy*
 - Transisi energi

- **Transformasi Digital:**
 - Infrastruktur Digital
 - Pemanfaatan Digital
 - Penguatan *Enabler*

- **Integrasi Ekonomi Domestik:**
 - (*economic powerhouse*)
 - Infrastruktur konektivitas: Superhub, Hub Laut, Hub Udara
 - *Domestic Value Chain*

- **Pemindahan IKN:**
 - Sumber pertumbuhan baru
 - Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah

4. Isabel Obadiaru, IPU SDG Project Officer Consultant on Inter-Parliamentary Union (IPU)

a. Struktur Perangkat Penilaian Mandiri TPB / SDGs Assesment Toolkits.

Struktur Perangkat Penilaian Mandiri / *Assesment Toolkit* terdiri dari pendahuluan dan pertanyaan. Berbagai pertanyaan tersebut dibagi ke dalam 8 bagian / bab yang relevan dengan fungsi parlemen. Beberapa bagian tersebut terdiri atas:

- ***Building an understanding of the SDG / Membangun pemahaman terkait SDGs.***

Bagian ini penting karena sebelum melakukan penilaian mandiri, penting bagi para peserta untuk memperoleh pemahaman awal mengenai SDGs dan ke-17 belas tujuannya. Walaupun anggota parlemen mungkin telah melakukan berbagai hal yang sebenarnya terkait dengan pencapaian Agenda 2030, tidak semua menyadari mengenai pentingnya untuk melakukan sinergi dan keterhubungan antar satu agenda dengan agenda lainnya. Tanpa pemeahaman agenda SDGs secara utuh, maka kebijakan yang dihasilkan termasuk dalam ranah parlemen menjadi tidak koheren antara satu dan lainnya.

- ***Bring the SDGs to the local level / Membawa SDGs ke tingkat lokal***

Tujuan-tujuan yang tercantum di dalam Agenda 2030 merupakan hasil kompromi di level antar-negara, sehingga fokus pada universalitas yang diharapkan dapat lebih mudah diterapkan di tingkatan lokal. Penerjemahan ke dalam realitas lokal menjadi penting, karena konteks dan situasi setiap negara bias jadi sangat berbeda. Jika lokalisasi ide-ide universal ini gagal dilakukan, maka akan kehilangan relevansi di level nasional yang tentu saja akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Di sinilah peran parlemen menjadi penting karena para anggota parlemen memiliki jaringan dan akses informasi level pertama di tingkatan lokal, menyuarakan ini kepada para pengambil kebijakan menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak terputus dari realitas yang ada di lapangan.

- ***Mainstream the SDGs within parliamentary mechanisms / Pengarusutamaan SDGs ke dalam mekanisme parlemen.***

Perdebatan di dalam parlemen antar berbagai kelompok didasari pada ide yang diterima secara luas yang mendorong para anggota parlemen bersuara. Menjadikan suatu ide terkait SDGs sebagai isu utama bukanlah hal yang mudah di tengah berbagai benturan ide dalam parlemen. Jika ide terkait SDGs sudah ada di dalam top of the mind para politisi, maka segala kebijakan yang dihasilkan.

- ***Pass laws in Support of SDGs, Finance the SDGs, & Monitor SDGs Implementation / Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan SDGs.***

Ketika fungsi di atas terkait erat dengan fungsi parlemen. Fungsi parlemen, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Setelah menjadikan ide-ide terkait SDGs sebagai panduan utama dalam penyusunan kebijakan, maka penting bagi parlemen untuk menjadikan ide tersebut ke tataran kongkrit yang sesuai dengan fungsi parlemen. Parlemen harus mampu menyusun legislasi yang mendorong pencapaian Agenda 2030 dan bahkan mempercepat prosesnya. Bukan hanya dalam tataran legislasi, yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang disusun bersama dengan pemerintah dapat mempercepat pencapaian dan di saat yang bersamaan juga harus diawasi agar dana yang telah disetujui tersebut dapat tepat sasaran.

- ***Engage the public & Ensure that the SDGs serve the most vulnerable* / melibatkan public dan memastikan bahwa SDGs mencapai mereka yang paling rentan**

Parlemen sebagai perwakilan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya mencapai tujuan-tujuan di dalam SDGs. Agar agenda 2030 dapat dilaksanakan secara baik keterlibatan publik dalam memberikan masukan dan berpartisipasi sangat penting karena merekalah yang akan menerima manfaat terbesar dari program yang ditawarkan, sehingga relevansi dengan kebutuhan mereka menjadi penting agar dana dan upaya yang telah dilakukan lebih tepat sasaran dan mencapai golongan yang paling rentan di dalam masyarakat, sesuai dengan slogan SDGs, yaitu “no one left behind”.

b. Beberapa contoh pelaksanaan SDGs Assesment Toolkits yang telah diselenggarakan oleh Parlemen

- **Parlemen Fiji**

Pada bulan Oktober 2017, anggota parlemen Fiji melakukan penilaian mandiri selama empat hari untuk menilai kapasitas mereka dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs. Ini adalah pertama kalinya penilaian mandiri dilakukan dengan menggunakan perangkat SDG IPU / UNDP;

Penilaian mandiri ini bertujuan untuk melihat masalah-masalah tertentu, misalkan, bagaimana mengarusutamakan SDGs ke dalam mekanisme parlementer; mengesahkan undang-undang untuk mendukung SDGs, bagaimana mengenai pembiayaan, memantau pelaksanaannya, dan memastikan bahwa masyarakat dilibatkan dan melayani yang paling rentan;

Para peserta juga menjelaskan sejumlah rekomendasi dan menekankan pentingnya terlibat secara luas dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan akses data yang lebih baik; untuk memasukkan SDGs masuk ke dalam proses disseminasi kepada anggota parlemen baru; untuk mengamanatkan SDGs masuk dalam rancangan undang-undang; dan lain sebagainya.

Pada Mei 2019, Parlemen Fiji meluncurkan laporan berjudul "Pengawasan terhadap implementasi SDGs", sebuah catatan panduan untuk Komite Tetap Parlemen. Panduan

ini dikembangkan sebagai tindak lanjut langsung dari temuan latihan penilaian mandiri SDG Fiji tahun 2017.

- **Parlemen Serbia**

Penilaian Mandiri dilakukan oleh sekelompok anggota parlemen lintas partai yang fokus pada isu SDGs dengan dukungan dari IPU dan UNDP. Penilaian mandiri mengidentifikasi sejumlah kesenjangan tetapi juga peluang untuk memajukan keterlibatan Majelis Nasional dalam implementasi SDGs.

Tindakan mendatang yang dipilih sebagai tindak lanjut, yaitu menyelenggarakan audiensi publik di parlemen dengan partisipasi koordinator dari pihak pemerintah; mempersiapkan strategi untuk menjangkau kaum muda; mempersiapkan amandemen RUU terkait anggaran; meminta dari pemerintah gambaran umum tentang bagaimana SDGs direfleksikan dan dimasukkan dalam undang-undang yang ada dan yang akan datang; menyelenggarakan audiensi publik tentang draf laporan sukarela nasional untuk HLPF pada tahun 2019.

Parlemen Serbia merupakan satu-satunya parlemen yang melaksanakan penilaian mandiri sebanyak dua kali. Penilaian mandiri kedua membantu Parlemen untuk mengembangkan proposal anggaran tahun berikutnya guna memperkuat implementasi SDGs di Serbia. Usulan tersebut kemudian diubah menjadi amandemen RUU APBN 2020.

- **Parlemen Georgia**

Pada bulan Juni 2018, Parlemen Georgia melakukan proses penilaian mandiri SDGs selama dua hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian yang dilakukan Parlemen dengan menggunakan perangkat IPU.

Pada tahun 2019 Biro Parlemen Georgia mengadopsi rencana aksi SDGs, yang disertai dengan Strategi Parlemen dalam mendukung dan memantau pelaksanaan SDGs. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari latihan asesmen SDGs yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Strategi ini tidak bertujuan untuk menciptakan mekanisme tambahan tetapi difokuskan pada penggunaan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan

Legislasi Georgia, dan juga untuk mencerminkan SDGs dalam kegiatan sehari-hari Parlemen.

Beberapa kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi SDGs adalah: menunjuk seorang anggota parlemen dan staf di setiap komite untuk bertanggung jawab atas SDGs; untuk membentuk SDGs di bawah Dewan Parlemen Permanen tentang Pemerintahan Terbuka; memberikan rekomendasi kepada kekuasaan eksekutif untuk memastikan bahwa dokumen kebijakan sektoral dan rencana aksi mencerminkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi indikator yang digambarkan dalam Dokumen Nasional SDGs; komite meminta informasi dari Pembela Umum, Kantor Statistik, LSM dan pemangku kepentingan lainnya, tentang status pelaksanaan SDG; mengadakan kampanye 17 hari di situs web Parlemen / media sosial: satu hari untuk setiap tujuan.

5. Sesi Tanya Jawab



Andi Yuliani Paris (F-PAN), anggota BKSAP mengajukan pertanyaan kepada para narasumber

Andi Yuliani Paris (F-PAN):

Q: Terkait pencapaian Bappenas mengenai SDGs dan menurunnya kebebasan sipil yang berpengaruh kepada akses terhadap informasi dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang belum responsif. Saran kepada Bappenas adalah bagaimana membawa SDGs ke level lokal? Dengan keadaan saat ini, pencapaian SDGs tidak lagi menjadi prioritas di masa pandemi ini. Bagaimana memastikan di tingkat lokal, pencapaian SDGs bisa tercapai?

Pertanyaan kepada Isabel Obadiaru: Negara yang menjadi contoh merupakan negara kecil. Bagaimana di Indonesia dengan kompleksitas yang berbeda?

A: Bappenas: Untuk mengukur keberhasilan pencapaian terkait data, telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terkait indikator lainnya yang tidak memerlukan survey survey mendetail telah secara rutin dilakukan oleh Bappenas.

Bagaimana melokalisasi SDGs dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Sudah Ada 21 SDGs Centre yang menjadi mitra pemerintah untuk mempelajari faktor-faktor pendukung, faktor yang menjadi kegagalan maupun solusinya. Beberapa indikator yang masih merah, akan ditindak lanjuti oleh pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait SDGs. UGM juga berupaya menghubungi para filantropis untuk mendukung tercapainya SDGs. Mahasiswa juga telah diturunkan ke desa dengan membawa solusi dan menjadi salah satu pengumpul data melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kementerian Desa dan Transmigrasi telah membuat program SDGs desa dengan mengupayakan bagaimana dana desa bisa menjadi pendukung pencapaian SDGs di desa.

A: Isabel Obadiaru: Implementasi SDGs tidaklah mudah dan berbeda- beda di setiap negara. Semua *assessment* dilaksanakan sesuai dengan aspek masing-masing negara. *Toolkits* ini adalah panduan universal yang bisa disesuaikan dengan parlemen masing-masing. Setiap parlemen juga akan memberikan jawaban yang berbeda dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang penting adalah komitmen yang kuat dalam mengisi *assessment* ini dalam mendukung tercapainya SDGs di setiap negara. Agar mereka sadar akan prioritas yang harusnya dimiliki pemerintah dan apa yang harus dicapai. Topik yang lebih relevan di Indonesia dibanding parlemen Negara lain.

Agar *Toolkit* ini lebih efektif, perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk mengisi dan mengakomodasi karakteristik yang ada di Indonesia. Melihat kerangka peraturan yang ada maupun peluang dalam memastikan legislasi yang ada sejalan dengan SDGs yang mendukung implementasi di negara masing-masing.



Puteri Komarudin (F-Golkar), anggota BKSAP mengajukan pertanyaan

Putri Komarudin (F-Golkar)

Mengapresiasi *Toolkit* sebagai alat untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Proses penilaian mandiri harus bersifat inklusif, dan pengisian harus dari berbagai latar belakang, terutama perwakilan dari segi geografis. Komisi XI sudah melakukan pengawasan pelaksanaan SDGs selama pandemi dan menekankan respon Covid-19 di Indonesia. Komisi XI juga telah menyusun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia terutama di saat pandemi. Beberapa hal yang menjadi fokus adalah subsidi kredit terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menekankan kepada pembangunan hijau, maupun proyek untuk energi terbarukan. Komisi XI juga telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengarusutamakan *green recovery*. Terkait strategi SDGs, anggaran parlemen harus

diinvestasikan kepada tujuan-tujuan di SDGs. Melalui Undang-undang, parlemen juga harus memastikan bahwa pencapaian SDGs bisa berlangsung dengan baik, sehingga parlemen memiliki peran yang besar dalam mendukung majunya SDGs secara nasional. Kami juga meminta Isabel dan IPU untuk memberi saran apa saja yang bisa kami lakukan? Apa yang dilakukan parlemen lain?

A: Isabel Obadiaru: Sebelum pandemi Covid-19, pencapaian masih perlu dipacu, namun dengan pandemi, pencapaian SDGs terus mengalami penurunan. Semua pemangku kepentingan dipanggil oleh SDGs untuk berkontribusi karena semua elemen memiliki peran yang sama-sama penting. Pandemi menciptakan masalah teknis baru. Kerangka SDGs juga diperhitungkan dalam rencana pemulihan dunia dalam mengatasi pandemic, baik dari sisi sosial maupun lingkungan hidup. Di Albania, parlemennya sudah melakukan pertemuan virtual dalam meningkatkan SDGs. Di Chad mengembangkan komite terkait SDGs. Setiap negara dan parlemen memiliki konteks masing-masing sehingga kita harus mengenali dengan baik, kebutuhan parlemen Indonesia seperti apa agar bisa diarusutamakan secara efektif. Menghidupkan diskusi dan wacana SDGs di masyarakat.



Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD), anggota BKSAP mengajukan pertanyaan

Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD)

Q: Bappenas: Rencana pemindahan ibukota sebagai salah satu jalan percepatan tujuan SDGs merupakan hal yang harus dipikirkan kembali apakah dapat memberikan manfaat di tengah situasi sekarang ini apakah masih relevan? Di Aamerika Serikat, ibukota berada di sisi timur negara, tidak harus berada di tengah? Sebagai contoh Putrajaya di Malaysia, tidak mudah memindahkan ibu kota negara, dengan segala kerumitannya. Di samping memakan biaya besar, tidak menjamin masyarakat lebih sejahtera.

Selama ini negara besar sudah diuntungkan oleh paten dari teknologi dan bagaimana alih teknologi dapat diformulasikan kedalam UU, agar teknologi kita tidak dicuri oleh negara lain?

Banyak keuntungan di sektor maritim, tetapi mengapa maritim bukan menjadi fokus terkait kepentingan nasional?

Dalam bidang pertanian juga sama, hanya sedikit tenaga kerja yang tertarik dalam bidang pertanian? Padahal kita negara agraris. Kita mempunyai bonus demografi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, jangan sampai tidak maksimal

A: Bappenas: IKN adalah bagian dari transformasi ekonomi. Untuk membangun sumber pertumbuhan baru, dan menyeimbangkan sumber pendapatan di seluruh Indonesia. Tujuan pembangunan IKN adalah untuk menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi terutama di Indonesia timur. Faktor pendorong adalah dengan pemindahan IKN.

Keunggulan komparatif di goal no 2, dengan modernisasi pertanian dan di dalamnya adalah perikanan dengan tujuan menarik anak muda untuk lebih bisa terjun di dunia pertanian dan perikanan, dan dihubungkan dengan korporasi agar bisa berhubungan dengan akses pasar. Akses untuk layanan belajar menjadi fokus kita, bagaimana akses internet termasuk harga bisa sama untuk semua masyarakat.

A: Kementerian Luar Negeri

VNR 2019 Indonesia dinobatkan sebagai goal 16 terbaik. Goal 16 dititikberatkan dalam masalah data, dengan data yang dianggap cukup komprehensif, bekerjasama dengan masyarakat sipil. Ada dua sorotan, hak minoritas dan LGBT, yang menjadi perhatian khusus di Indonesia.

Inovasi pembiayaan terkait *green economy*, Indonesia cukup inovatif dalam penanganan iklim. Yang jadi masalah adalah target goal 4 belum tercapai, disebabkan oleh negara maju yang belum mendukung terutama dalam masalah pendanaan.

Sumber daya genetic harus bisa kita raih hak ciptanya dan patennya, contohnya batik, kopi luwak.



Anggota BKSAP yang menghadiri Focus Group Discussion berfoto bersama

III. PENUTUP

A. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk mengikuti acara ini adalah sejumlah Rp. 296.528.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*

- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti *Focus Group Discussion on the Sustainable Development Goals and Covid-19 Pandemic: Road to Indonesia Voluntary National Review 2021* pada hari Kamis, 1 April 2021. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2021

Ketua Delegasi,



Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., MBA

A-139

BAHAN PAPARAN



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

OPENING REMARKS

**INFORMATION WEBINAR ON THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS AND COVID-19 PANDEMIC: ROAD
TO INDONESIA VOLUNTARY NATIONAL REVIEW 2021
1 APRIL 2021**

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Peace be upon us all***

***Leaders and Members of the Committee for Inter-Parliamentary
Cooperation of the House of Representatives of the Republic of
Indonesia,***

***Dr. Arifin Rudiyanto, Deputy Minister for Maritime and Natural
Resources Affairs, Ministry of National Development Planning***

***Mr. Hari Prabowo, Director for Trade, Commodities and Intellectual
Property, Ministry of Foreign Affairs***

Ms. Isabel Obadiaru, IPU SDG Project Officer Consultant

Ladies and Gentlemen,

The Agenda 2030 Declaration acknowledges the “essential roles of national parliaments through their enactment of legislation and adoption of budgets, and their role in ensuring accountability for the effective implementation of our commitments”. It lays the foundation for the recognition on the role of parliament, and parliamentarians as elected representatives of people, to promote the people-centered approach to policy and legislation. More than that, it puts a strong emphasis on accountability as a critical requirement for SDGs to deliver results to the people while also committed to maintain inclusiveness. More importantly, SDGs also emphasizes on the principle of “Leaving no one behind” and seek to reach out all people, primarily those in need and deprivation. Both accountability and inclusiveness require local and disaggregated data to analyze outcomes and track progress.

As part of its follow-up and review mechanism, the 2030 Agenda encourages member states to conduct regular and inclusive national and sub-national reviews of progress, which are country-led and country-driven.

In our soon to begin Webinar, we will explore in depth on Voluntary National Review as the basis of regular reviews by the High-Level Political Forum under the auspices of ECOSOC.

Today's webinar will also give us a golden opportunity to learn more on the IPU-UNDP SDGs self-assessment exercise. The results we get from the exercise will help us to determine our current level of engagement with SDGs and to explore areas in which improvement are needed.

Thus, I believe the IPU-UNDP SDGs self-assessment toolkits and Voluntary National Review could mutually reinforce each other.

Ladies and gentlemen,

With less than a decade before 2030, we only left with limited time to make sure our world then is far better than the one we left behind in 2020. Moving forward, extraordinary and accelerated actions are needed to speed up progress. What we are doing in the Committee for Inter Parliamentary Cooperation, through the Working Group on SDGs, through dialogue with other national stakeholders, through our active engagement with other national parliaments in the IPU, are intended to accelerate collaborative action to fast-track the SDGs.

I would like to conclude by extending my appreciation to our national leading entities on SDGs, the Ministry of National Planning and the Ministry of Foreign Affairs. I commend the excellent work in leading our 2021 Voluntary National Review during challenging time. I would also like to extend my appreciation to IPU for our cooperation. We are keen to continue our close cooperation with IPU, among all, through hosting the Global Parliamentary Meeting on the SDGs this year and IPU Assembly in April 2022.

I wish you an exciting and engaging webinar.

I look forward to our discussion later in the day.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) DAN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA BANGKIT DARI COVID-19

Ir. Arifin Rudiyanto, MSc.,PhD

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Selaku Ketua Tim Pelaksana Nasional TPB/SDGs
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS



Disampaikan *Focus Group Discussion* dengan
BKSAP DPR RI
1 April 2021



OUTLINE

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

- Visi Indonesia 2045
- Landasan Hukum
- Capaian TPB/SDGs
- Tantangan

2. Mendesain Ulang Transformasi Ekonomi Indonesia Bangkit dari COVID-19

- Dunia Pasca COVID-19
- Strategi Pelaksanaan
- Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- Orkestrasi Pembangunan

3. Agenda SDGs tahun 2021



1.

**PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SDGs)**



VISI INDONESIA 2045 INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU

- **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030** memberikan landasan kokoh menuju **Indonesia Maju**
- **Transformasi Ekonomi** telah dimulai dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs

Rata-rata pertumbuhan
2015-2045:

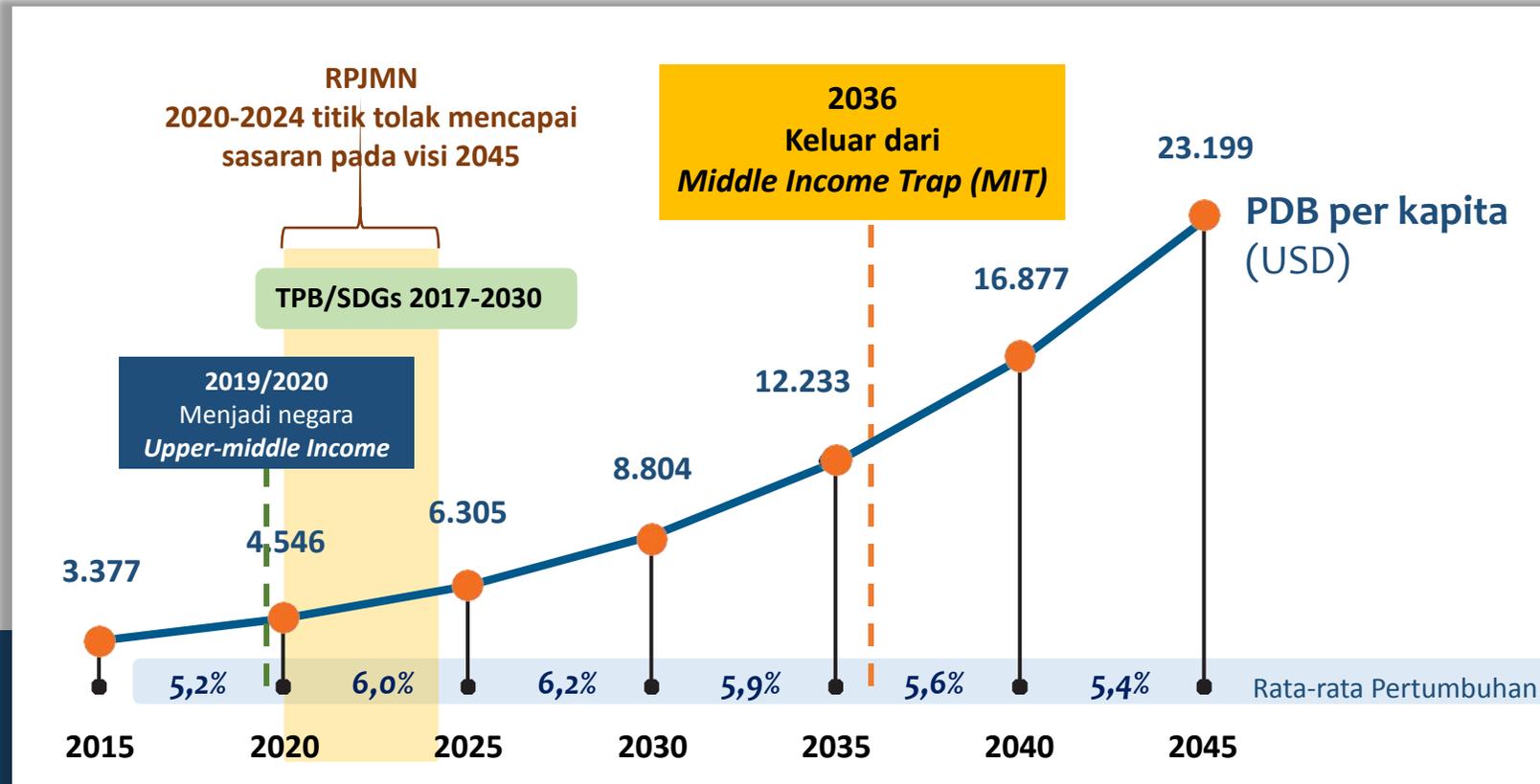
PDB Riil **5,7%**

PDB Riil / Kapita **5,0%**

Tahun 2045:

Peranan Kawasan
Timur Indonesia
(KTI) **25%**

Negara Maju dan
PDB terbesar **Ke-5**
(USD 7,4 triliun)





AMANAT PERPRES NO. 59 TAHUN 2017: PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perpres No.59 Tahun 2017 menetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksanaan SDGs di Indonesia, yang ditugaskan untuk:

1. Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs
2. Menyusun dan Menetapkan Peta Jalan TPB/SDGs 2030
3. Memfasilitasi dan mendampingi penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB 5 (lima) tahunan
4. Memantau, evaluasi dan melaporkan pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional dan daerah
5. Mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
6. Membentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Dewan Pakar



- **Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018** tentang Koordinasi, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan TPB/SDGs
- **Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 127 Tahun 2018** tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar TPB/SDGs 2017-2019

- **Peraturan Gubernur**
- **Peraturan Bupati/Walikota**

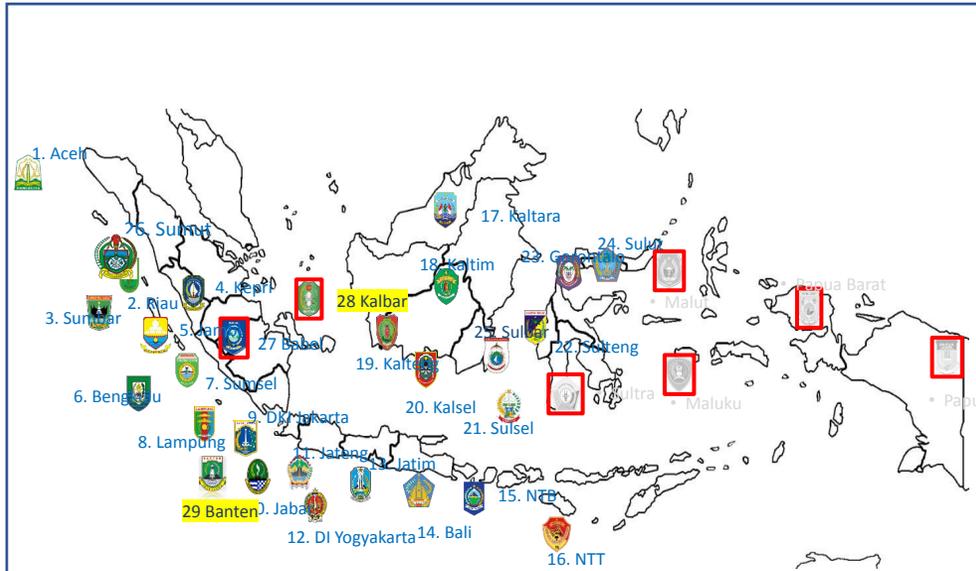


CAPAIAN PELAKSANAAN TPB/SDGS



Peta Jalan TPB/SDGs 2017 – 2030 adalah skenario pencapaian TPB/SDGs yang menggunakan proyeksi *Business as Usual* dan proyeksi akselerasi pencapaian target menggunakan skenario intervensi kebijakan

Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2017-2019



29 Provinsi telah menyusun RAD TPB/SDGs



Keterlibatan dalam G20



Laporan Capaian SDGs Nasional 2019



Voluntary National Review (VNR) 2017 & 2019

- Pelaporan untuk tingkat global
- VNR Indonesia 2017: salah satu yang terbaik dari 6 negara
 - VNR Indonesia 2019: salah satu terbaik dalam pelaporan Goal 16



PELAKSANAAN TPB/SDGs DI DAERAH DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN NON PEMERINTAH



Kegiatan Pemangku Kepentingan

- DPR –World Parliamentarian Forum
- BPK –Intosai
- Baznas – Fiqih Zakat on SDGs
- Filantropi Festival
- Pedoman Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan
- Pembentukan “SDGs Academy”



Sekitar **100 perusahaan** yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menyampaikan **Sustainability Report**, sebagai:

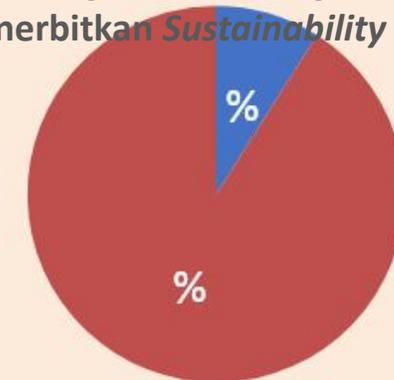
- Laporan partisipasi dalam implementasi SDGs

Telah terbentuk 21 SDGs Center /Network di Perguruan Tinggi



91% dari Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Telah Menyampaikan Sustainability Report

Jumlah Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten yang menerbitkan Sustainability Reporting



■ Jumlah yang Menerbitkan ■ Jumlah yang tidak Menerbitkan



PENCAPAIAN TPB/SDGs YANG SEJALAN DENGAN 7 AGENDA PEMBANGUNAN: 70% dari 280 Indikator TPB/SDGs Tercapai dan Membaik



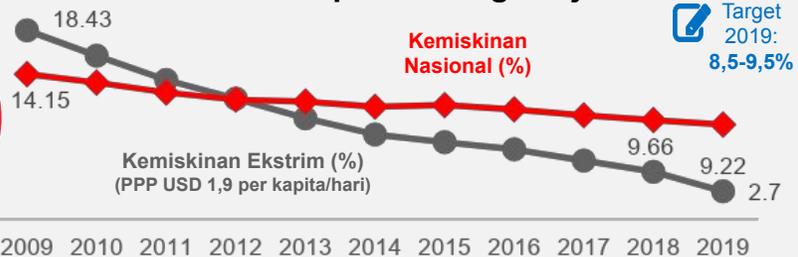
7 AGENDA PEMBANGUNAN	KESELARASAN TPB/SDGs	Status Capaian 280 Indikator TPB/SDGs Tahun 2019		
		TERCAPAI	MEMBAIK	PERLU PERHATIAN
1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	 	39 Indikator	23 Indikator	34 Indikator
2. Karakter Bangsa				
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas	 	30 Indikator	9 Indikator	11 Indikator
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan	 	6 Indikator	2 Indikator	8 Indikator
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	 	24 Indikator	2 Indikator	16 Indikator
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		17 Indikator	6 Indikator	9 Indikator
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	 	30 Indikator	8 Indikator	6 Indikator
Total: 280 Indikator		146 Indikator (52%)	50 Indikator (18%)	84 Indikator (30%)



CAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 1&2: SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING SERTA BERKARAKTER



Angka kemiskinan terus menurun dan berhasil mencapai satu digit sejak 2018



Sumber: Bank Dunia dan BPS (Kondisi September)

1 TANPA KEMISKINAN

2 TANPA KELAPARAN

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

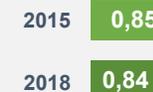
5 KESETARAAN GENDER

Prevalensi penyakit menular menurun tetapi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Meningkat

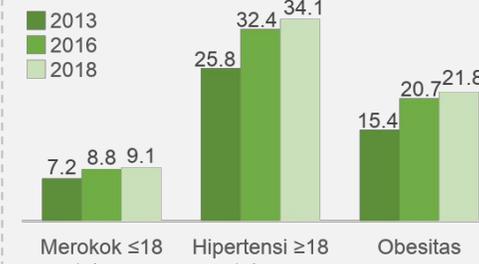
Insiden Tuberkulosis
(per 100.000 kelahiran hidup)



Insiden Malaria
(per 1.000 penduduk)

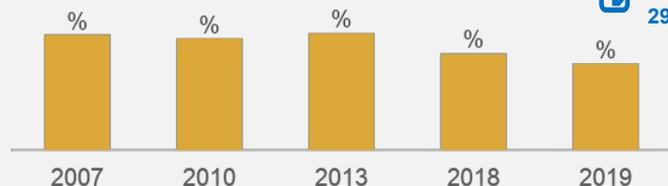


Proporsi Faktor Risiko PTM (%)



Sumber: Riskesdas dan Sirkesnas (Kemenkes)

Angka balita *stunting* terus menurun tetapi proporsinya masih cukup tinggi



Sumber: Riskesdas dan SSGI (Kemenkes)

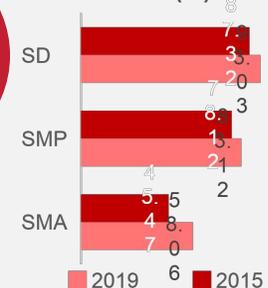
Proporsi perempuan 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama <18 tahun terus menurun



Sumber: Susenas (BPS)

Akses terhadap layanan pendidikan terus meningkat tetapi kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan

Tingkat Penyelesaian Sekolah (%)



Sumber: Susenas Kor (BPS)

Proporsi siswa mencapai tingkat kompetensi minimum dalam membaca dan matematika (%)



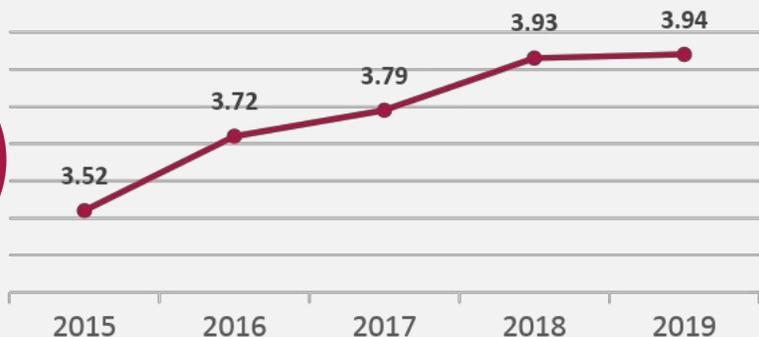
Sumber: PISA (UNESCO)



CAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 3: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS



Laju pertumbuhan PDB per kapita (%) terus meningkat hingga tahun 2019



Sumber: BPS

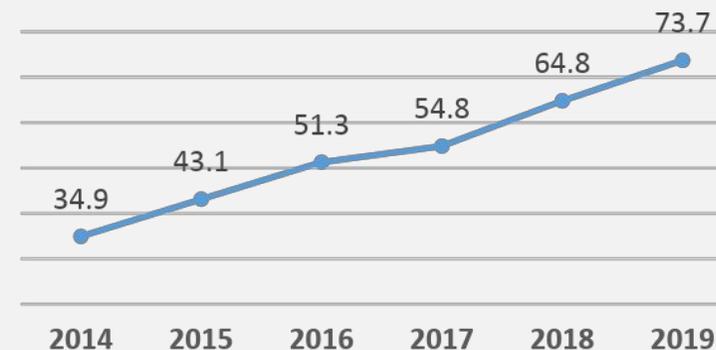
Tingkat pengangguran terbuka (%) terus menurun hingga 2019 walaupun masih belum melampaui target.



Sumber: BPS, 2020



Proporsi Pengguna Internet



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia



CAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 4: PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK PEMERATAAN



Angka kemiskinan terus menurun dan berhasil mencapai satu digit sejak 2018

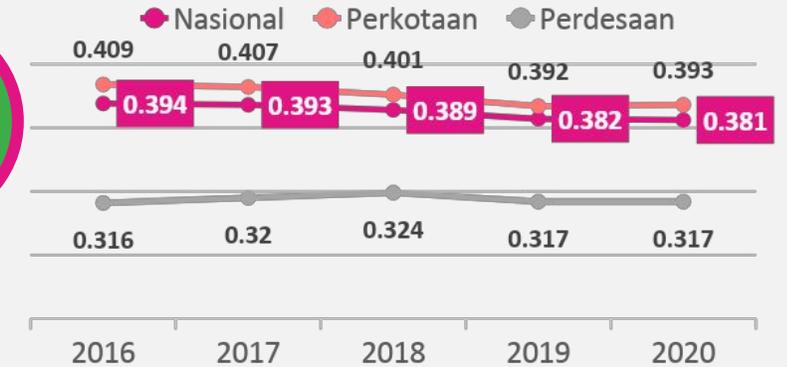


Sumber: Bank Dunia dan BPS (Kondisi September)

1 TANPA KEMISKINAN

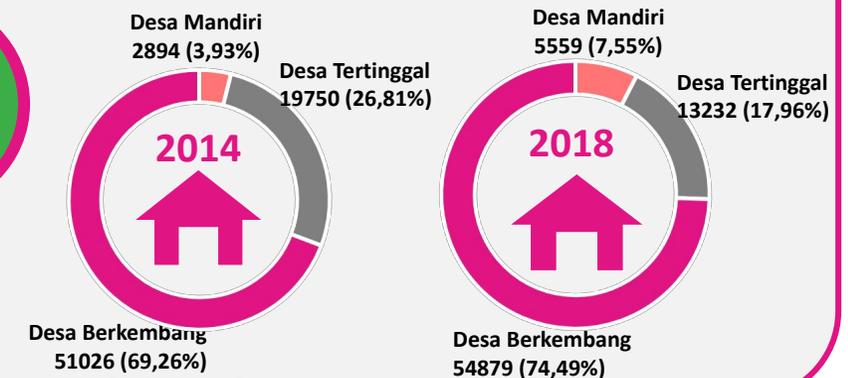
10 BERKURANGNYA KESEMIANGAN

Semakin menurunnya Rasio Gini menunjukkan kesenjangan di Indonesia semakin menurun.



Sumber: BPS, 2020 (Maret)

Jumlah Desa Tertinggal terus menurun, sedangkan Jumlah Desa Mandiri dan Desa Berkembang terus meningkat.



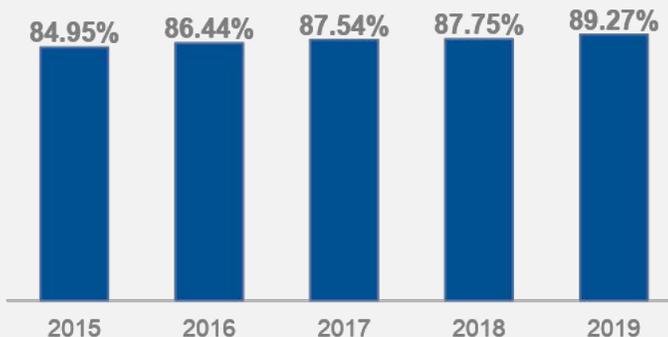
Sumber: Indeks Pembangunan Desa



CAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 5: INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

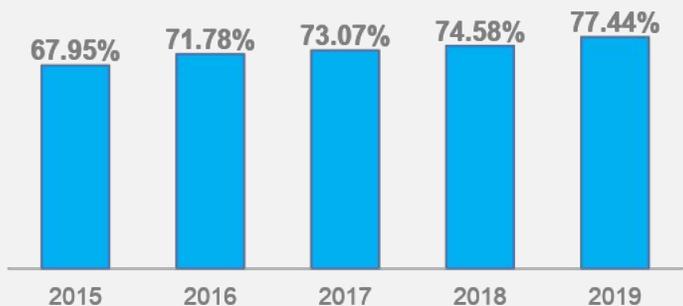


Akses Air Minum Layak Rumah Tangga terus mengalami peningkatan



Sumber: Susenas BPS diolah Bappenas

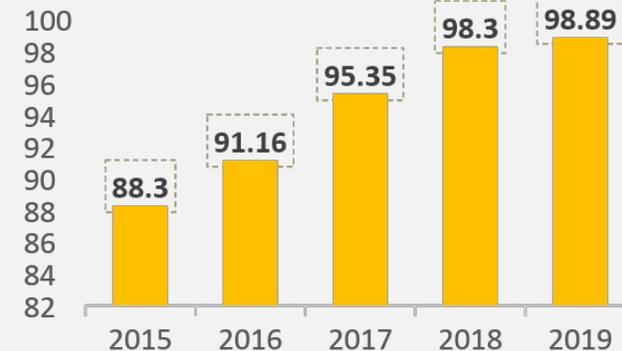
Akses Sanitasi Layak Rumah Tangga terus mengalami peningkatan



Sumber: Susenas BPS diolah Bappenas



Rasio Elektrifikasi (%) terus meningkat setiap tahunnya



Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, PLN (2019)

Pembangunan jalan nasional sebagai penghubung daerah terus ditingkatkan



Sumber: Kementerian PUPR



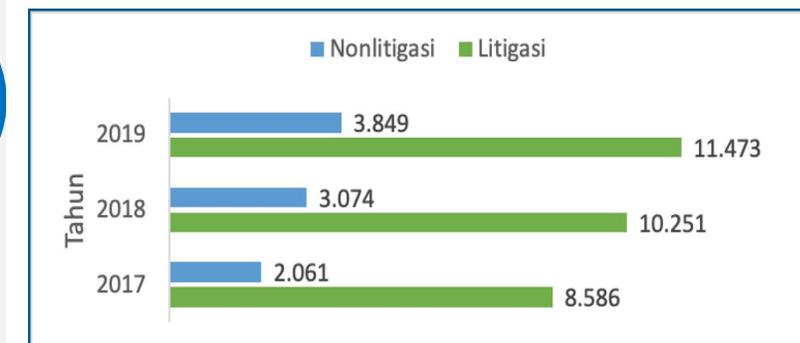
CAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 6: STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

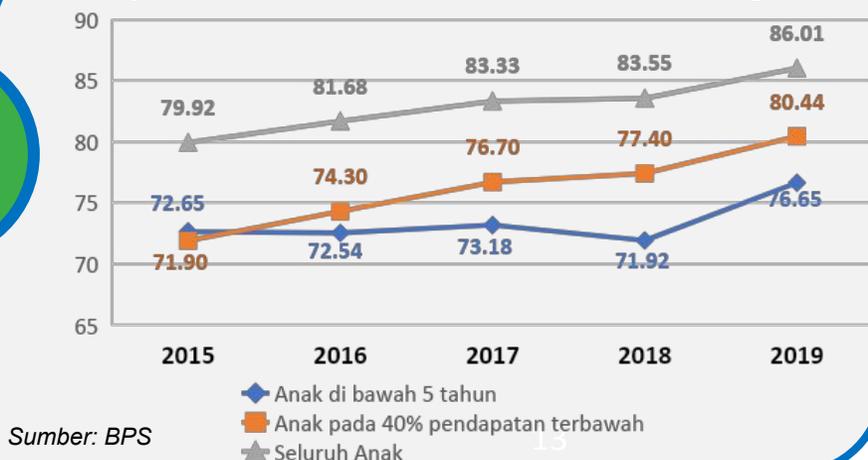


Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi 2017 – 2019 terus meningkat



16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kepemilikan Akta Kelahiran semakin meningkat



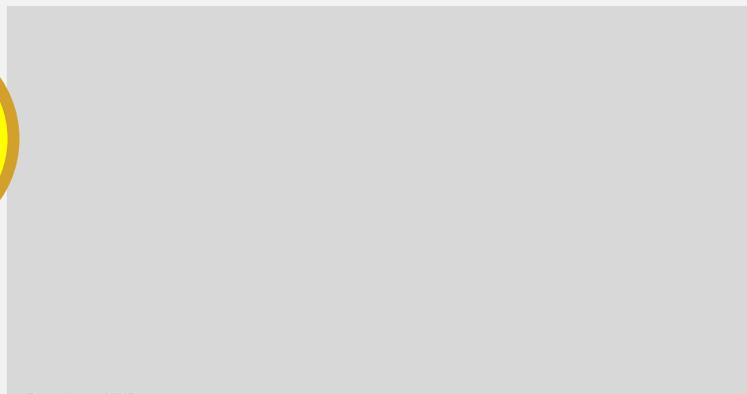
Indeks Perilaku Anti Korupsi





CAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 7: LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

Angka Kepemilikan Rumah Layak Huni
Terus Meningkat Sejak 2015



Sumber: BPS

11 KOTA DAN
PEMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN



13 PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM



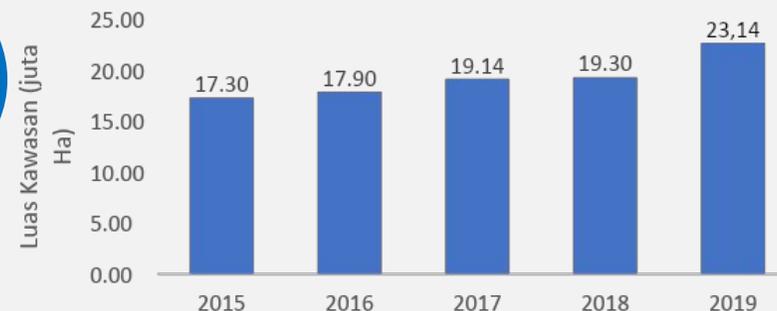
14 EKOSISTEM
LAUTAN



15 EKOSISTEM
DARATAN



Luas Kawasan Konservasi Perairan Terus Meningkat
Sejak Tahun 2015



Sumber: KKP

Capaian Potensi
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) dari
Baseline Akumulatif

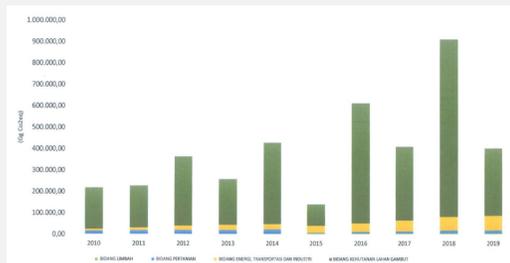
23,46 persen

atau

3.974.513 ribu Ton CO₂e

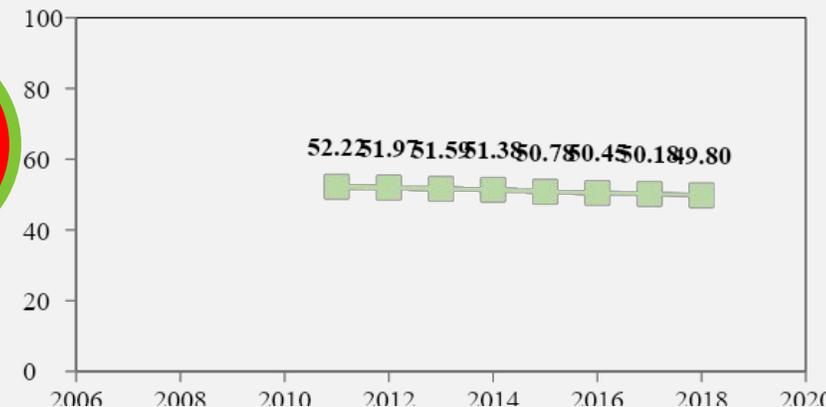
2019

Capaian Penurunan Emisi GRK
Sektoral 2010-2019



Sumber: Bappenas

Proporsi tutupan hutan dan lahan menurun
dari 52,22% (2011) menjadi 49,80% (2018)



Sumber: KLHK



TANTANGAN UTAMA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DAN TPB/SDGs TAHUN 2019 (1/2)

SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Karakter Bangsa



- Melambatnya laju penurunan kemiskinan
- Rendahnya ketahanan pangan dan gizi
- Terbatasnya akses air minum dan sanitasi
- Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan kompetensi tenaga kesehatan serta gaya hidup sehat
- Belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah dan pendidikan inklusif
- Belum seluruh guru memenuhi syarat sertifikasi, pengembangan kurikulum, akses internet dan media ajar.
- Masih rendahnya kompetensi siswa untuk matematika dan membaca

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas



- Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja, terutama untuk lapangan kerja formal
- *Mismatched* dalam pasar tenaga kerja
- Masih rendahnya kualitas investasi dan kapasitas inovasi untuk mendorong pertumbuhan industri
- Belum optimalnya proses transformasi ekonomi
- Belum terjangkaunya penyediaan layanan telekomunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat

Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan



- Laju penurunan rasio Gini masih lambat
- Masih rendahnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di perdesaan
- Masih rendahnya pertumbuhan sumber daya di luar Jawa
- Masih tingginya kesenjangan antarkelompok pendapatan, antara perkotaan dan perdesaan, antar wilayah.



TANTANGAN UTAMA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DAN TPB/SDGS (2/2)

Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



- Belum optimalnya integrasi infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi pergerakan barang dan orang
- Belum optimalnya kehandalan pelayanan ketenagalistrikan
- Terbatasnya infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) *middle* dan *last mile* untuk menjangkau seluruh wilayah
- Terbatasnya kualitas pemanfaatan digitalisasi untuk penciptaan nilai tambah termasuk lapangan kerja untuk generasi muda
- Terbatasnya keamanan siber sejalan dengan diversifikasi pemanfaatan digitalisasi

Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



- Pelayanan publik yang belum responsif dan optimal terhadap kebutuhan kelompok rentan
- Masih belum memadainya kapasitas dan persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi untuk melakukan bantuan hukum bagi orang dan kelompok miskin
- Masih relatif rendahnya keterwakilan perempuan yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



- Terbatasnya akses pembiayaan perumahan
- Kurangnya fasilitas pengangkutan dan pengolahan sampah
- Rendahnya Perilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- Tingginya *food waste*
- Rendahnya kualitas dan tata kelola penyediaan air bersih
- Rendahnya manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- Masih adanya pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan, dan penambangan tanpa ijin
- Ancaman kepunahan satwa langka



DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENCAPAIAN TPB/SDGs

Risiko Ekonomi

- **Penurunan daya beli masyarakat**
 - Adanya *loss of income* sebesar Rp 374,4 Triliun*
- **Peningkatan angka kemiskinan**
 - Persentase penduduk miskin meningkat 0,97 persen (yoy) menjadi 10,19 persen pada September 2020**
- **Peningkatan angka pengangguran**
 - 14,28% penduduk usia kerja terdampak COVID-19 dengan 2,56 juta orang menganggur**
- **Peningkatan kesenjangan**
 - Rasio Gini meningkat 0,005 (yoy) menjadi 0,385 pada September 2020**
- **Kegiatan komersial menurun**
 - **Transportasi dan Pergudangan menurun pada Q4 -13,42% (yoy)****
 - **Penyediaan akomodasi makan dan minum Q2 -8,88% (yoy)****



Risiko Sosial

- **Peningkatan risiko kekurangan gizi (*wasting*)**
 - 36% responden berkurang konsumsi pangannya akibat hambatan finansial*
- **Pelayanan kesehatan esensial terkendala**
 - 55% posyandu menunda layanan imunisasi dan 46% menunda layanan antenatal untuk ibu hamil**
- Penerapan PSBB dan **transformasi sistem pendidikan “Pembelajaran Jarak Jauh”** sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan dukungan teknologi untuk kualitas pembelajaran yang efektif.
 - Keterbatasan akses internet pada siswa/mahasiswa di luar Pulau Jawa khususnya wilayah timur Indonesia.
 - Kelompok siswa/mahasiswa miskin (20% terbawah) cenderung memiliki akses internet yang lebih rendah sebesar 38,46% dibanding kelompok kaya (20% teratas) sebesar 81,68%***



Risiko Lingkungan

- **Peningkatan timbulan sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)**
 - Jumlah limbah medis dari Pandemi COVID-19 ini meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas*.
- **Peningkatan sampah plastik medis dan peralatan medis**
 - Limbah medis yang dihasilkan Indonesia per hari sebanyak 294,66 ton**
- **Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi** akibat berpindahnya pengguna transportasi umum
 - 88% angkutan umum perkotaan (MRT, LRT, TJ dan KRL) menurun dan 93% penumpang bus AKAP dan kereta api juga menurun***

*Bappenas dan LPEM UI, 2020

**BPS 2020

*UNICEF, COVID-19 and Children in Indonesia: An Agenda for Action to Address Socio-Economic Challenges, 11 May 2020

** MoH & UNICEF, Rapid Health Assessment: Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers During the COVID-19 Pandemic in Indonesia, July 2020

***Susenas, BPS 2020

*KLHK, Perkuat Regional untuk Respon Limbah Infeksius COVID-19, 18 May 2020

** Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Permasalahan limbah medis covid 19 di Indonesia, Vol. XII, No. 9//Puslit/Mei/2020

***Bappenas, Dampak COVID19 terhadap Pembangunan & Respon Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, Webinar 28 mei 2020



PESAN KUNCI

1



TPB/SDGs akan menjadi landasan bagi Indonesia untuk mendesain ulang Transformasi Ekonomi.

2



Arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan harus selaras dengan prinsip *green recovery* dan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai TPB/SDGs.



2.

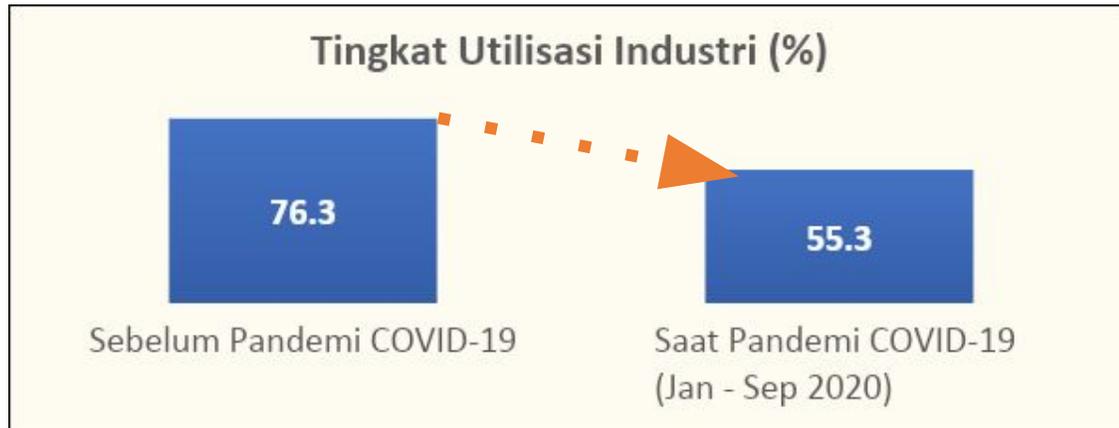
REDESAIN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA BANGKIT DARI COVID-19



DAMPAK PANDEMI COVID-19

1 PENURUNAN UTILISASI INDUSTRI DAN KEHILANGAN JAM KERJA

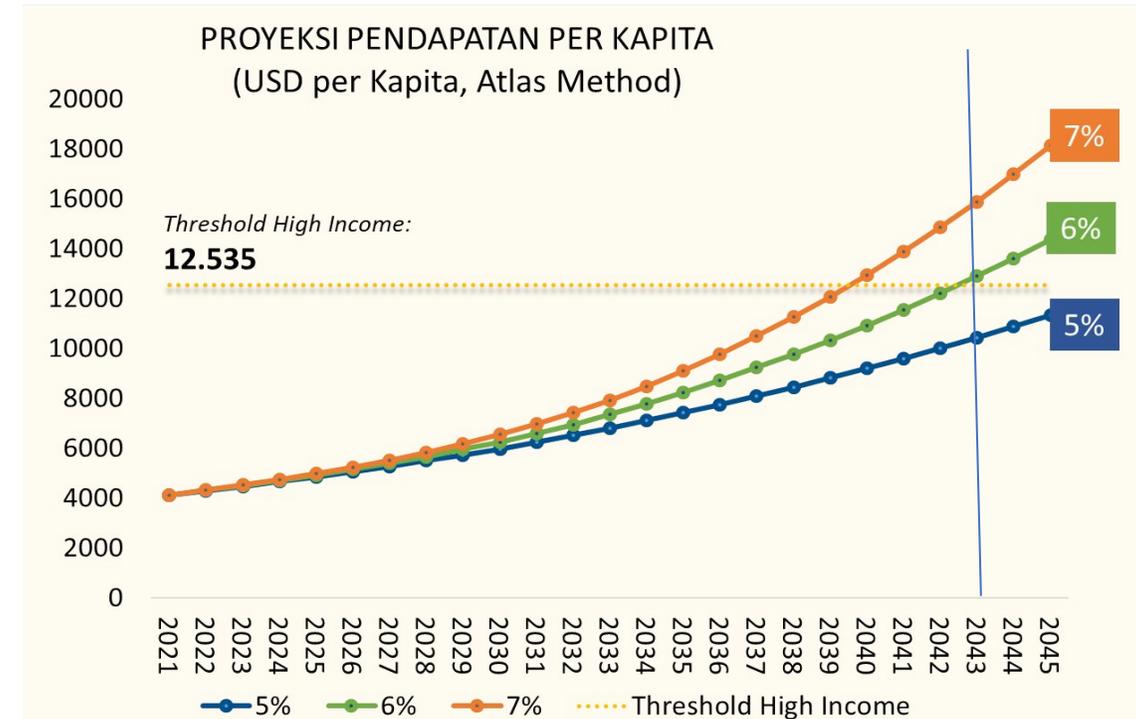
2 TARGET VISI 2045 TERTUNDA



Komponen	Total (juta orang)
Pengangguran karena Covid-19	2,56
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19	0,76
Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19	1,77
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	24.03
Total	29,12

Sumber: Kementerian Perindustrian, BPS

Kehilangan daya beli masyarakat akibat *Loss of Income* adalah: Rp 374,4 triliun karena penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilisasi 50% (Sumber: Exercise Bappenas)



- Skenario sebelum pandemi mensyaratkan pertumbuhan ekonomi **5,7 persen/tahun untuk menjadi negara maju pada tahun 2036.**
- Tetapi, pasca pandemi pencapaian pertumbuhan **6 persen** baru akan membawa Indonesia menjadi negara maju (**lepas dari middle income trap**) pada tahun **2043.**



PANDEMI MEMBAWA PERUBAHAN SITUASI DAN PERADABAN

PENGALAMAN PANDEMI SEBELUMNYA

Black Death (1334 – 1350)

- Berakhirnya perbudakan (*serfdom*) di Eropa: perbaikan hak dan kesejahteraan pekerja.
- Akselerasi “*Renaissance*” dari abad pertengahan (abad kegelapan) dan bangkitnya Gerakan *Humanism* (1400 – 1600).

Spanish Flu (1918-1919)

- Akselerasi ilmu medis modern.
- Awal *golden age* (Globalisasi 1.0: awal koordinasi kebijakan global).

Dunia Pasca Covid-19 (2020)



Perubahan Sistem Kesehatan



Akselerasi Otomasi & Digitalisasi



Peningkatan Peran *Artificial Intelligence* (AI) & Big Data



Perubahan *Global Value Chain*



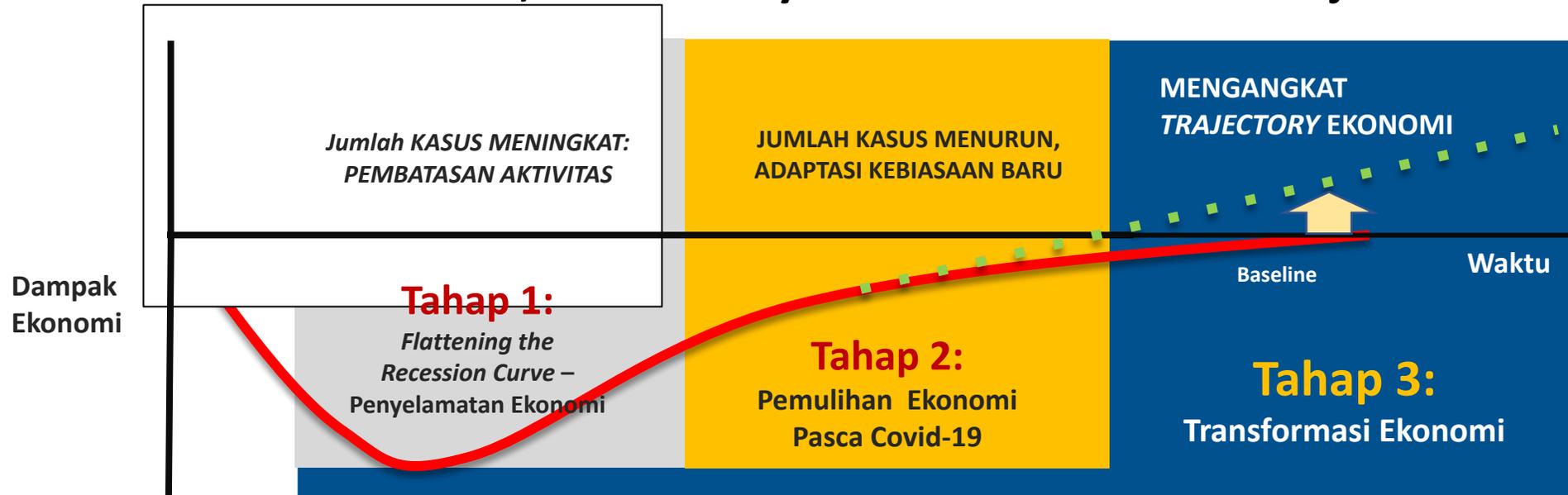
Peningkatan Tren *Telework*



Green Recovery



TUGAS BESAR BANGSA INDONESIA ADALAH: Melakukan Transformasi Ekonomi Indonesia untuk Mengangkat *Trajectory* Ekonomi, bukan hanya Pemulihan Ekonomi saja



Pemulihan ekonomi:

NECESSARY CONDITION, BUT NOT SUFFICIENT



Pemulihan Ekonomi:

- Jangka pendek
- Intervensi sisi permintaan (*demand side*)

Menjaga daya beli (bansos, subsidi, dll)

Menciptakan permintaan dengan peluang kerja dan kebutuhan suplai barang/jasa



Transformasi Ekonomi:

- Jangka Menengah - Panjang
- Intervensi sisi produksi (*production side*)
 - **Total Factor Productivity**
 - **Produktivitas Modal**
 - **Produktivitas Tenaga Kerja**



TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA)



“Build Forward Better”



Strategi #1

SDM berdaya saing:

- Sistem Kesehatan
- Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)
- Riset dan Inovasi



Strategi #3

Ekonomi Hijau:

- Ekonomi rendah karbon
- *Blue Economy*
- Transisi energi



Strategi #5

Integrasi Ekonomi Domestik: (*economic powerhouse*)

- Infrastruktur konektivitas: Superhub, Hub Laut, Hub Udara
- *Domestic Value Chain*



Strategi #2

Produktivitas Sektor Ekonomi:

- Industrialisasi
- Produktivitas UMKM
- Modernisasi Pertanian



Strategi #4

Transformasi Digital:

- Infrastruktur Digital
- Pemanfaatan Digital
- Penguatan *Enabler*



Strategi #6

Pemindahan IKN:

- Sumber pertumbuhan baru
- Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah

Keenam strategi di atas merupakan “game changer” untuk menuju Indonesia Maju



3.

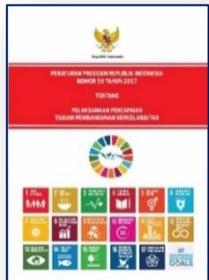
**AGENDA BESAR
PELAKSANAAN
TPB/SDGs TAHUN 2021**

PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL SDGs 2020-2024



PENYUSUNAN RAN SDGS 2020-2024

- Melanjutkan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs Tahun 2017-2019
- Selaras dengan RPJMN 2020-2024



RAN 2017-2019

RAN 2020-2024

RAN 2025-2030

Selaras dengan
Peta Jalan SDGs
Menuju 2030



Roadmap SDGs Menuju 2030



Rencana Aksi Daerah (RAD) Hingga 2030

Acuan penyusunan RAD SDGs di daerah



MATRIKS RENAKSI TPB/SDGS

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)				Instansi Pelaksana (5)
			2016	2017	2018	2019	

BAG 1

TARGET DAN
INDIKATOR TPB

Nama Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2016	2017	2018	2019			
PROGRAM PEMERINTAH								
INDIKATOR 1								
PROGRAM 1								
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan							
	1.2. Indikator Kegiatan							
Kegiatan 2	2.1. Indikator Kegiatan							
	2.2. Indikator Kegiatan							

BAG 2

PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KEGIATAN YANG
DILAKSANAKAN
PEMERINTAH

Nama Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA									
INDIKATOR TPB 1:									
PROGRAM 1 :									
Kegiatan 1:	1.1. Indikator Kegiatan:								
	1.2. Indikator Kegiatan:								
Kegiatan 2:	2.1. Indikator Kegiatan:								
	2.2. Indikator Kegiatan:								

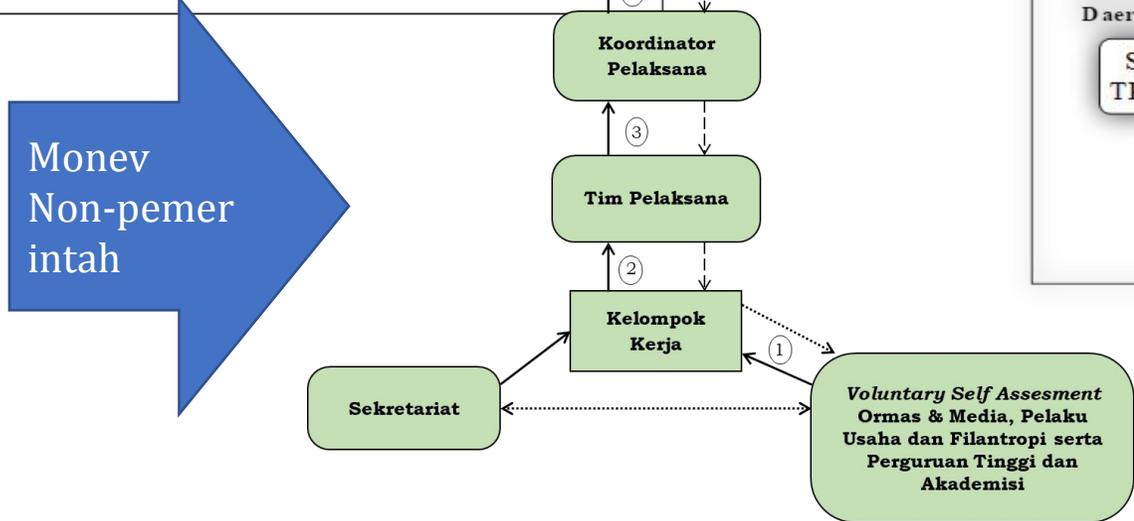
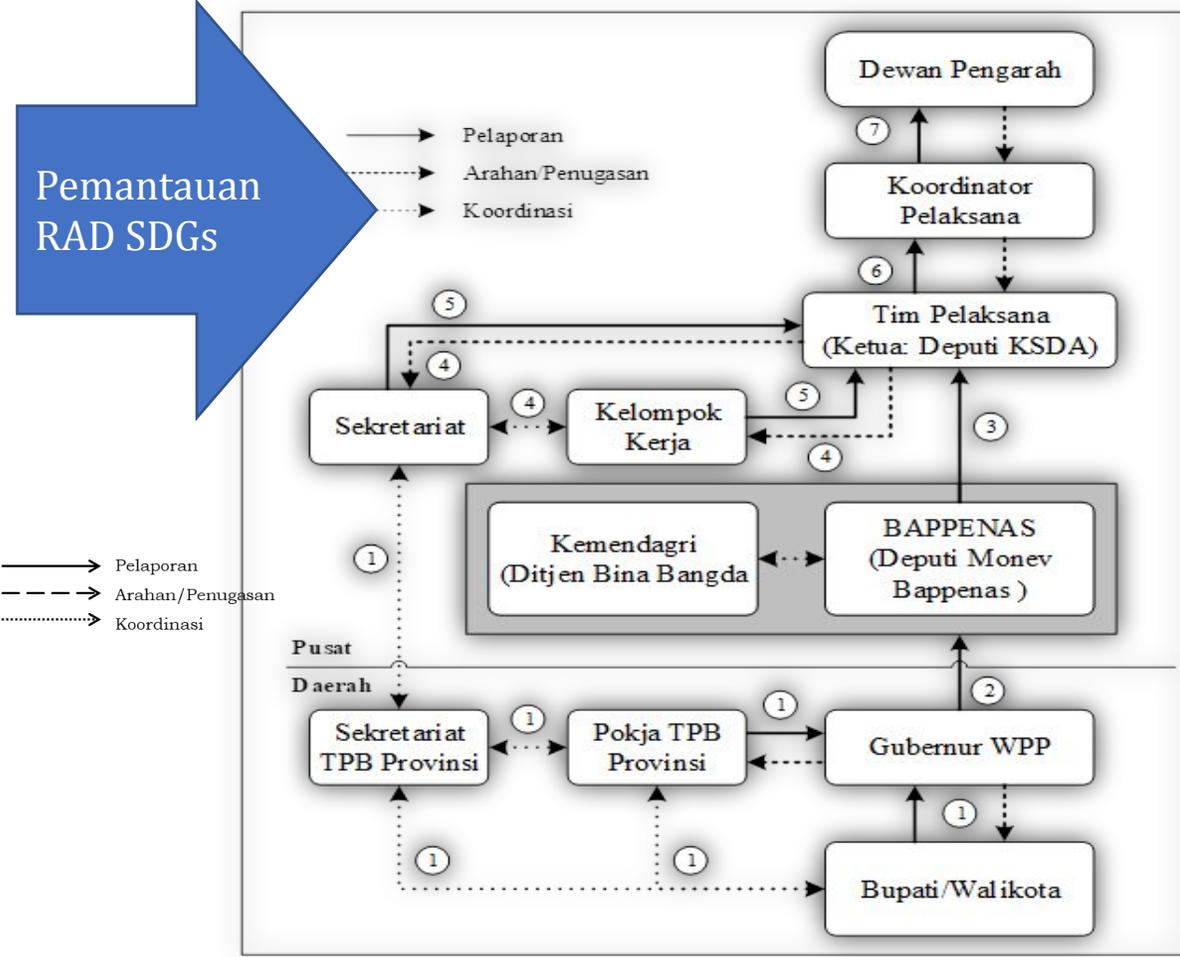
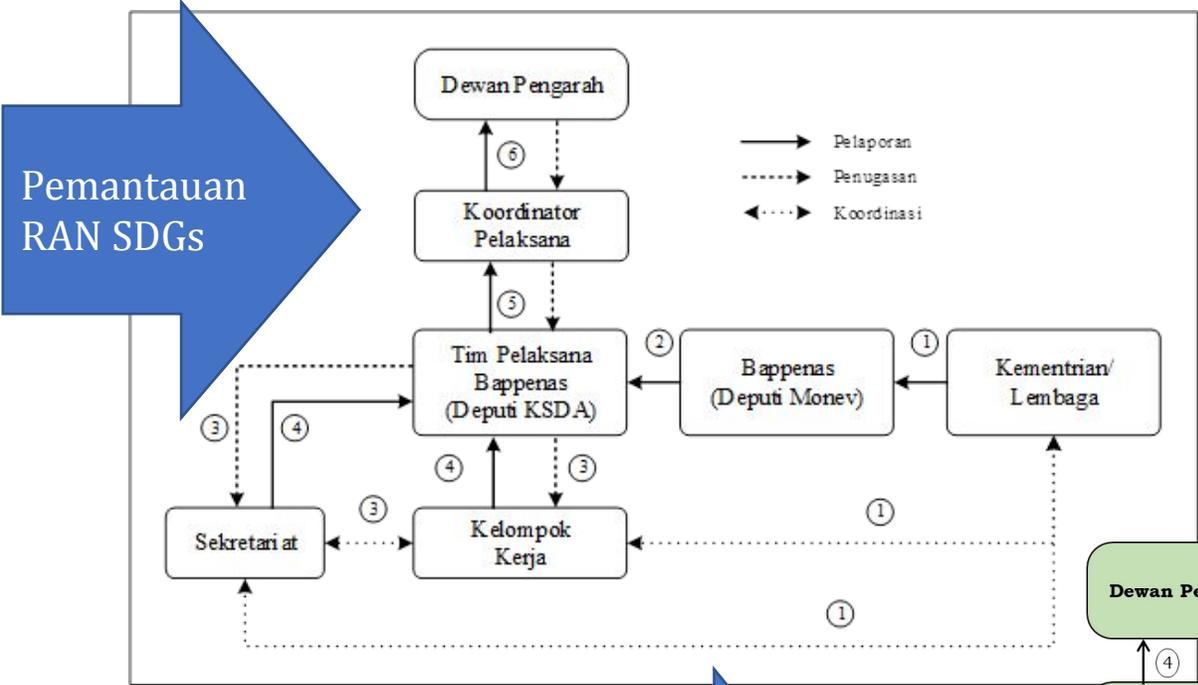
BAG 3

PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KEGIATAN YANG
DILAKSANAKAN
OLEH NON
PEMERINTAH

Catatan: Matriks Renaksi untuk Nonpemerintah sedang direvisi sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pelaporan di setiap platform (Bisnis, CSO dan Akademisi)



PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SDGS



Pedoman Teknis Monev SDGs

PENYUSUNAN
***VOLUNTARY NATIONAL REVIEW* SDGs 2021**



PENYUSUNAN VNR 2021 DAN FOKUS TUJUAN/GOALS

Tema VNR 2021

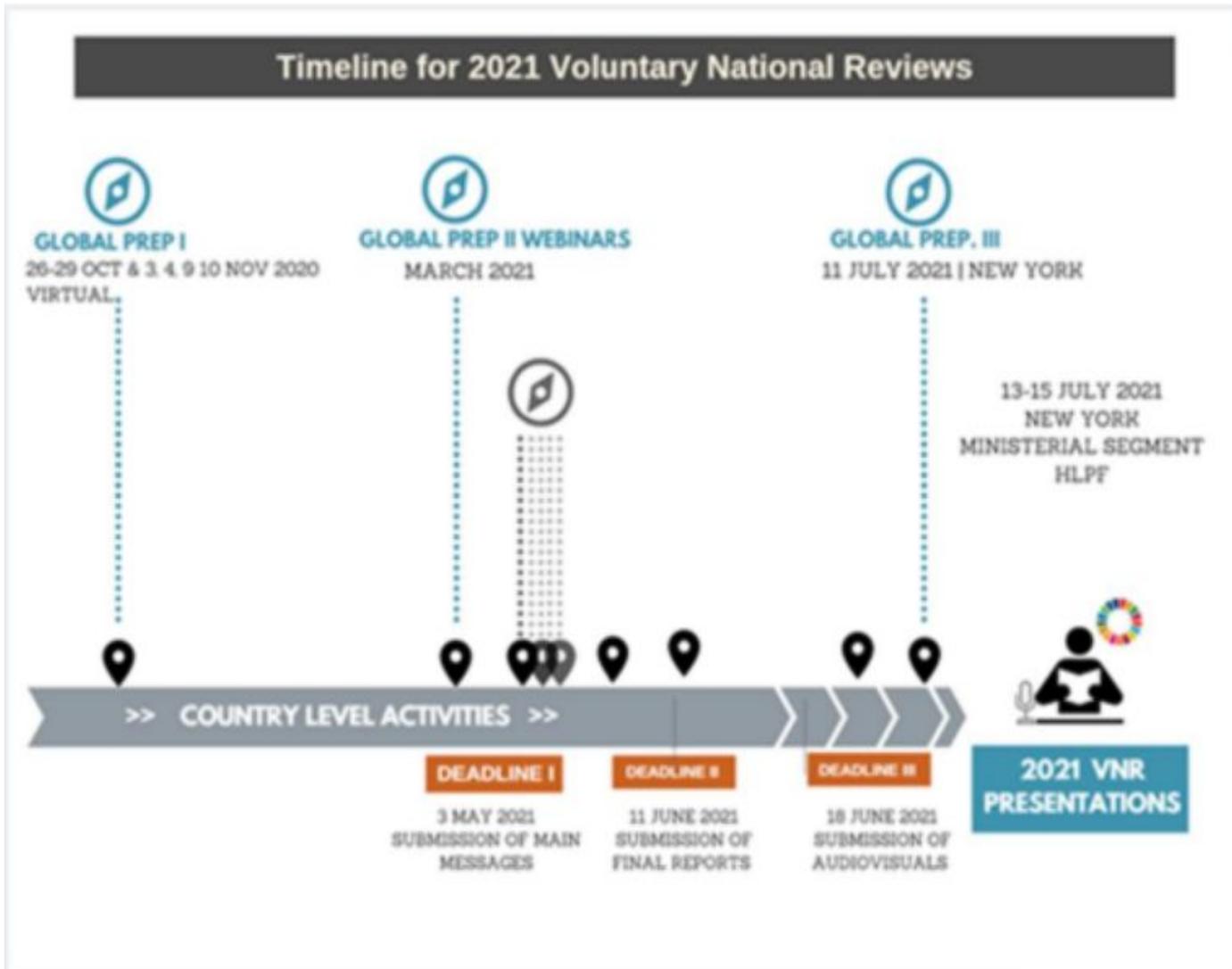
"Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development"

Fokus Tujuan/Goals

1. **Goal 1:** Tanpa Kemiskinan
2. **Goal 2.** Tanpa Kelaparan
3. **Goal 3.** Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. **Goal 8.** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
5. **Goal 10.** Berkurangnya Kesenjangan
6. **Goal 12.** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
7. **Goal 13:** Penanganan Perubahan Iklim
8. **Goal 16.** Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
9. **Goal 17.** Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



JADWAL UTAMA VNR DAN HLPF 2021 (GLOBAL)



1. **Tenggat waktu penyampaian VNR 2021 :**
 - **Main message** disampaikan pada tanggal **3 Mei 2021**;
 - **Final report** disampaikan pada tanggal **11 Juni 2021**;
 - **Audio Visual** disampaikan pada Tanggal **18 Juni 2021**.
2. **HLPF 2021** dibawah tanggung jawab ECOSOC di UNHQ New York:
 - Tanggal **6 – 15 Juli**
 - Tanggal **13-15 Juli 2021** adalah **Ministerial segment** (Presentasi VNR)



JADWAL PENYUSUNAN VNR 2021 (INDONESIA)

No.	KEGIATAN	Jan		Feb				Mar					Apr				Mei				Juni				
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penentuan tim Konsultan VNR 2021																								
2	Brainstorming mengenai Building Blocks/Framework																								
3	Kick off meeting penyusunan VNR 2021																								
4	Penyiapan bahan referensi dan data (baseline 2019 dan data sampai dengan tahun 2021)																								
5	Penyusunan draf 0 masing-masing Goal oleh Sub Pokja dibantu konsultan (sesuai tema HLPF)																								
6	Konsolidasi antar Goal																								
7	Rapat dengan pemangku kepentingan dan kelompok rentan																								
8	Penyempurnaan draf 0 menjadi draf 1																								
9	Konsultasi publik online draf 1																								
10	Penyempurnaan draf 1 menjadi draf 2																								

POSISI SAAT INI



STRUKTUR VNR 2021

- 1. *Opening Statement***
 - 2. *Highlight***
 - 3. Pendahuluan**
 - 4. Metodologi dan proses penyiapan review**
 - 5. Kebijakan dan perkuatan lingkungan yang mendukung
(*Enabling environment*)**
 - 6. Kemajuan pencapaian Tujuan dan Sasaran/Target**
 - 7. Sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*)**
 - 8. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya**
- Lampiran Statistik**



RANCANGAN FRAMEWORK VNR 2021

INDONESIA

Sustainable dan resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda

Reformasi

Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi menuju Ekonomi Hijau (termasuk Goal 2)

Sistem Ketahanan Bencana

Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Perlindungan Sosial

Goal 8

- 8.1 Pertumbuhan ekonomi
- 8.3 UMKM
- 8.5 Pengangguran
- 8.6 Pengangguran muda
- 8.9 Pariwisata berkelanjutan

Goal 12

- 12.4 Pengelolaan limbah
- 12.6 Praktek berkelanjutan
- 12.8 Pendidikan PB

Goal 13

- 13.1 Ketahanan bencana
- 13.2 Adaptasi & mitigasi Perubahan Iklim

Goal 2

- 2.1 Akses Pangan
- 2.2 Malnutrisi
- 2.3 Produksi Pangan
- 2.4 SP Berkelanjutan
- 2.a Inv & Inf. petani
- 2.c Volatilitas Harga

Goal 3

- 3.1 PKU 15-19
- 3.3 Insiden TB & Malaria
- 3.8 Unmet Need, Pengeluaran RT, JKN
- 3.b Proporsi faskes
- 3.c Distribusi Nakes
- 3.d Regulasi Kesehatan

Goal 1

- 1.1 Kemiskinan Ekstrem
- 1.2 Kemiskinan Nasional
- 1.3 Perlindungan Sosial
- 1.4 Pelayanan Dasar
- 1.a Alokasi pemerintah untuk kemiskinan

Goal 10

- 10.1 Kesenjangan sosial
- 10.4 Perlindungan sosial

Enabler: Goal 16

- 16.1 & 16.2: kekerasan; 16.3 & 16.9: Akses keadilan; 16.5: antikorupsi; 16.6: akuntabilitas; 16.10: keterbukaan informasi; 16.b: nondiskriminasi

Mol: Goal 17

- 17.1: Pajak; 17.6 & 17.8: internet; 17.11 Ekspor nonmigas; 17.19: Data Sensus



FORMAT PELAPORAN BEST PRACTICE (1)

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang Replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.



FORMAT PELAPORAN BEST PRACTICE (2)



The infographic features a colorful banner at the top with the logos of the Indonesian National Secretariat for Sustainable Development (Bappenas) and the High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2021. The main text is in Indonesian, detailing the VNR 2021 process. It includes two QR codes: one for downloading the form and another for direct submission. A central map of Indonesia is surrounded by icons for the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). At the bottom, there is a row of all 17 SDG icons.

Indonesia akan menyampaikan *Voluntary National Review (VNR)* untuk ketiga kalinya pada *High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)* tahun 2021*).

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksanaan SDGs Indonesia **mengajak seluruh pihak** untuk menyusun bersama **VNR 2021** yang akan melaporkan antara lain pelaksanaan program/kegiatan terbaiknya (*best practices*) dan pembelajaran (*lessons learned*) yang sejalan dengan tema HLPF dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

Format laporan best practices dapat diunduh melalui tautan: <https://s.id/formVNR2021> atau dapat mengisi secara langsung melalui tautan: <https://s.id/VNR2021> dengan batas waktu mengunggah (upload) sampai **tanggal 27 Maret 2021**

SCAN barcode ini untuk mengunduh formulir

SCAN barcode ini untuk isi form secara langsung

Fokus Goal VNR 2021:

- 1. LAKUKAN KEBERKHAIRAN
- 2. AIR BERSIH
- 3. KEMISKINAN DAN KELAPARAN
- 4. PENDIDIKAN LAYAK DAN PERTUKARAN PENGETAHUAN
- 5. KESEHATAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS
- 6. ENERGI BERSIH DAN TERKAWAL
- 7. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUKARAN PENGETAHUAN
- 8. KEMERDEKAAN BERKUALITAS
- 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
- 10. KEMERDEKAAN BERKUALITAS
- 11. KOMUNITAS BERKUALITAS
- 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKUALITAS
- 13. TANGGAPAN IKLIM
- 14. KEHAYATAN LAUT DAN PERAIRAN
- 15. LINGKUNGAN DARAT DAN LAUT
- 16. PERSEMBAHAN DAN KEADILAN SOSIAL
- 17. KEMERDEKAAN BERKUALITAS

<https://s.id/formVNR2021>

<https://s.id/VNR2021>

*) Informasi terkait HLPF dan VNR 2021 dapat diakses pada laman: <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021>

- Format laporan best practices dapat diunduh melalui tautan: <https://s.id/formVNRID2021>
- atau
- Dapat mengisi secara langsung melalui tautan: <https://s.id/VNR2021> batas waktu mengunggah (upload) sampai tanggal 27 Maret 2021*)
- Informasi terkait HLPF dan VNR 2021 dapat diakses pada laman: <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021>
- Sampai 27 Maret 2021 sudah terkumpul 143 masukkan Best Practice dari berbagai K/L. Pemda, NGO, Pelaku Usaha dan Bisnis, Piantropi dan akademisi.



TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs



MENUJU 2030

1

Mengoptimalkan keanggotaan multipihak dan peran **Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs serta sinergi kerja sama dengan Lintas K/L**

2

Meningkatkan Integrasi TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional: Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMN dan Renstra K/L

3

Menyelaraskan **RAN TPB/SDGs (sebagai “Wadah/Payung”)** dengan berbagai RAN yang telah ada, seperti RAN-Pangan dan Gizi, RAN-GRK, Stranas PB, dll;

4

Eksplorasi pembiayaan kegiatan pencapaian TPB/SDGs yang memadai sesuai dengan kewenangan serta kemitraan dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

5

Dukungan **penyediaan dan manajemen data** yang baik dan valid untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs.
Koordinasi yang baik BPS Provinsi dan K/L penyedia

6

RAN adalah sebuah *living document*.
Terdapat kesempatan untuk melakukan Kaji Ulang Dokumen RAN setiap tahunnya.

7

Melakukan **sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi** pelaksanaan TPB/SDGs kepada seluruh pemangku

8

Memperkuat mekanisme dan fasilitasi **pemantauan dan evaluasi** serta menyusun **laporan** kegiatan pelaksanaan RAN TPB/SDGs



TANTANGAN PELAKSANAAN SDGS

Pemahaman konsep, kerangka dan prinsip SDGs belum merata



Sehingga pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan belum holistik termasuk perwujudan di tingkat masyarakat

Pelibatan Semua Pihak



Untuk memastikan pelaksanaan prinsip inklusif dan *no one left behind* belum maksimal

Sinergi program kegiatan pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah dan NSA



Sinergi yang tidak berjalan berdampak pada efektivitas dan daya ungkit program untuk mencapai SDGs

Pengukuran capaian SDGs di tingkat subnasional (provinsi dan kab/kota)



Keterbatasan data dan penerjemahan indikator di tingkat daerah bahkan sampai desa, termasuk pentingnya keterbandingan data capaian antartingkatan atas 17 *goals* SDGs.



TERIMA KASIH



sdgs.bappenas.go.id
sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
021 - 21394812



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Parliaments and the Sustainable Development Goals

Bringing the SDGs from the global to the local level
– the role of self-assessment

Isabel Obadiaru, SDG Project Officer

“Information Webinar on the Sustainable Development Goals and Covid-19 Pandemic;
road to Indonesia Voluntary National Review 2021”

1 April 2021

SDG Self-Assessment Toolkit

- Developed in 2016 in order to assist parliaments **to identify a tailored strategy to effectively support the implementation of the SDGs**
- **Voluntary practice** that can help improve the performance of key parliamentary functions, including legislation, representation and oversight
- Solutions found through **inclusive dialogue**
- Helps identify baselines, tailored strategies and priorities to institutionalize the framework and engage in implementation: **Action plan developed**
- Parliaments can ask for assistance from IPU and UNDP, if needed
- Results can be shared through IPU regional seminars, Standing Committee on UN Affairs



The Self-Assessment Toolkit: How is it structured?

- Q1: Build an understanding of the SDGs
- Q2: Bring the SDGs to the local level
- Q3: Mainstream the SDGs within parliamentary mechanisms
- Q4: Pass laws in support of SDGs
- Q5: Finance the SDGs
- Q6: Monitor SDGs implementation
- Q7: Engage the public
- Q8: Ensure that the SDGs serve the most vulnerable

Part A: Identify the baseline

Part B: Where do we want to go from here?



Self-assessment of Fiji's Parliament

- In October 2017 MPs undertook a four-days self-assessment exercise to assess their capacity to achieve the SDGs. This was the first time that a self-assessment was carried out using the IPU/UNDP SDG toolkit;
- The self-assessment exercise looked at specific issues e.g. how to mainstream SDGs into parliamentary mechanisms; passing laws to support SDGs, financing them, monitoring their implementation, and ensuring that the public are engaged and that the SDGs service the most vulnerable;
- Participants elaborated a number of recommendations and emphasized the importance: to broadly engage with government and civil society to ensure better access of data; to include SDGs in induction courses for new MPs; to mandate systematic SDGs assessment of draft bills; and to organize more consultations on SDGs with citizens and communities in rural/remote areas;
- In May 2019 the Fiji Parliament launched “Oversight of the implementation of the SDGs”, a guidance note for the Standing Committees of the Parliament. This guide was developed as a direct follow up to the findings of Fiji's 2017 SDG self-assessment exercise.



Self-Assessment of Serbian Parliament

- Conducted by the cross-party Parliamentary Focus Group on the SDGs with support from IPU and UNDP.
- The self-assessment identified a number of gaps but also opportunities to advance the engagement of the National Assembly in SDG implementation.
- Agreed future actions (selected):
 - organize public hearing in parliament with participation of the government's coordinator of the SDGs;
 - prepare a strategy to reach out to young people;
 - Prepare amendments to the budget bill;
 - request from government an overview of how SDGs are reflected and included in existing and future legislation;
 - organize public hearing on the draft national voluntary report to HLPF in 2019.
- The only parliament that used the self-assessment twice. The 2nd self-assessment helped the Parliamentary Focus Group on the SDGs develop proposals for the following year's budget to further strengthen SDG implementation in Serbia. Those proposals were subsequently turned into amendments to the 2020 budget bill.



Self-assessment of the Parliament of Georgia

- In June 2018 the Parliament of Georgia undertook a two-day SDG self-assessment exercise. This activity was part of a series of self-assessments (SDGs, gender and democratic parliaments) that the Parliament undertook using the IPU tools.
- In 2019 the Georgia Parliament Bureau adopted the SDGs action plan, which was accompanied by the Strategy of the Parliament on Supporting and Monitoring the Implementation of SDGs. This action was a follow up to the SDGs self-assessment exercise organized in 2018.
- The Strategy does not aim at creating additional mechanisms but is focused on using those that are already envisaged in the Rules of Procedure and in the Legislation of Georgia, and also on reflecting the SDGs in the daily activities of the Parliament.
- Some of the activities listed in the SDGs action plan are: to designate an MP and a staffer in each committee to be responsible for the SDGs; to form an SDG WG under the Permanent Parliamentary Council on Open Governance; to provide recommendations to the executive power to ensure that the sectorial policy documents and action plans reflect the measures that are necessary to meet the indicators envisaged in the National Document on SDGs; the committees inquire information from the Public Defender, Statistics Office, NGOs and other stakeholders, about the status of SDG implementation; to hold a 17-day campaign on the website of the Parliament/social media: one day per each goal



Translation of the self-assessment toolkit



- The toolkit was originally available in English, Spanish, French and Arabic
- To raise further awareness and strengthen the sense of national ownership, the toolkit has also been translated into additional languages (e.g., Georgian, Russian, Serbian, Vietnamese, Armenian....)
- These translations were done by the concerned parliaments or the UNDP country office.





**Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia**



Focus Group Discussion

“Pencapaian SDGs dan Penyusunan VNR 2021 di Tengah Pandemi”

Kamis, 1 April 2021

Hari Prabowo

Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup
Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

 @pelh.kemlu



Dampak Pandemi Covid-19 pada SDGs Global

71 juta orang menjadi miskin ekstrim (*extreme poverty*)



Employment loss 114 juta, terdiri atas 33 juta pengangguran baru & 81 juta pengangguran tak kentara



Peningkatan kematian balita, kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Pendidikan 90% atau 1,57 milyar pelajar terganggu, terutama kaum miskin yang tidak punya akses teknologi.



**Menurut laporan *Sustainable Development Goals 2020* dan Publikasi *ILO Monitor* 25 Januari 2021

Dampak sosio-ekonomi pandemi COVID-19 berpotensi menjadi **“lost decade”** pertumbuhan dan pembangunan.

- Laporan *World Bank Global Economic Prospects*, Januari 2021



Dampak Pandemi Covid-19 pada SDGs Regional

- **Asia-Pasifik saat ini belum *on-track* untuk mencapai agenda 2030.**
- **Pembelajaran utama** yang diambil dari pandemi dalam mencapai Agenda 2030, a.l.:
 - Pendanaan publik sangat penting untuk program pemulihan COVID-19 dan pencapaian SDGs, terutama untuk ketersediaan *public goods and equity*;
 - Perlunya berinvestasi dalam *cost-effective technology* untuk pengumpulan data;
 - Perlunya mendesain ulang sistem keuangan dan investasi agar kompatibel dengan aksi iklim;
 - Memperkuat layanan informasi iklim untuk sektor dan masyarakat rentan, mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM dan *gender-responsive*;
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mempercepat aksi iklim.

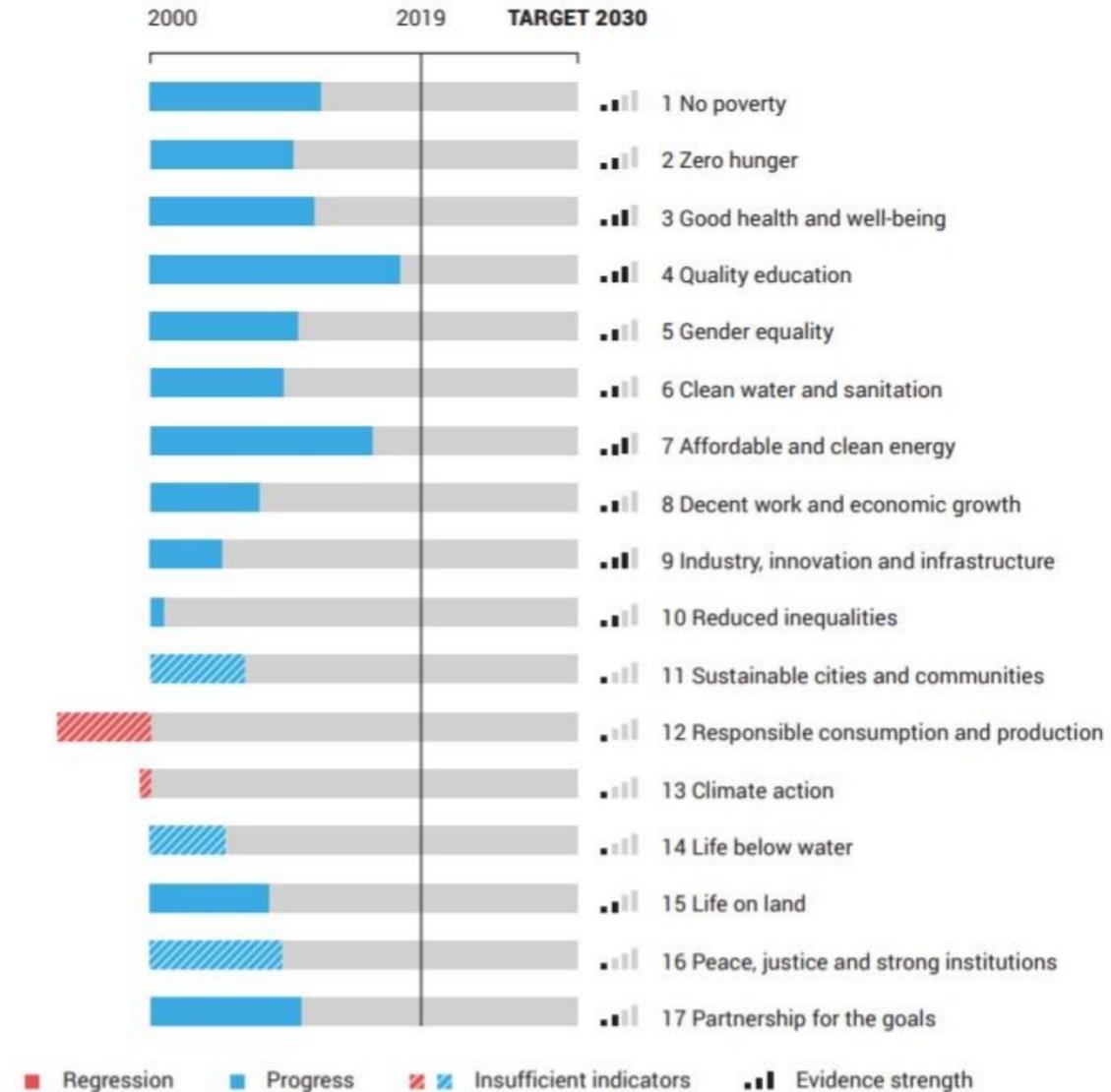


Figure 1. Snapshot of SDG progress in 2019 in the Asia-Pacific region



Dampak Pandemi Covid-19 pada SDGs Indonesia

1 NO POVERTY



115 juta penduduk Indonesia berada di kelas ekonomi “calon” menengah dan sangat rentan terhadap dampak pandemi. Sekitar 27% dari mereka diperkirakan akan menghadapi sejumlah masalah pendapatan yang sangat membahayakan.

2 ZERO HUNGER



Pembatasan sosial skala besar telah menghambat sistem transportasi dan logistik makanan di Indonesia.

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



Berkurangnya investasi pada kesehatan diri sendiri karena kurangnya pendapatan, seperti pemeriksaan rutin, makanan bergizi, dan vitamin, barang-barang yang penting untuk membangun imunitas tubuh terutama di tengah pandemi.

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



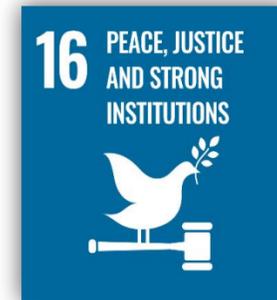
Banyak pemilik bisnis menutup perusahaan mereka, yang menyebabkan gangguan di pasar tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan masyarakat miskin.



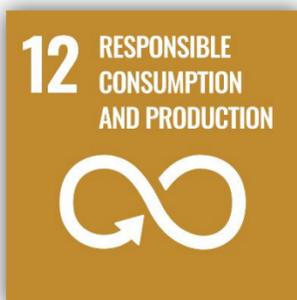
Dampak Pandemi Covid-19 pada SDGs Indonesia



Kebijakan *lockdown* berdampak signifikan terhadap pendapatan penduduk kelas bawah dan pekerja informal, memperparah kesenjangan.



Penyebaran teori konspirasi tentang virus yang diyakini sebagian orang, membuat pencegahan penularan virus semakin sulit. Pihak-pihak tersebut tidak akan menuruti protokol kesehatan dan menambah risiko tersebarnya virus.



Peningkatan jumlah limbah, terutama limbah plastik dan medis. Selain limbah, ada peningkatan potensi polusi selama tahap pemulihan



Pentingnya pembiayaan eksternal untuk meratakan kurva penyebaran virus di Indonesia



Pengabaian mitigasi dan adaptasi iklim. Industri-industri akan mendorong pemulihan ekonomi, yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon



Pembelajaran penting dari pandemi COVID-19

Pandemi telah menggarisbawahi pentingnya untuk **menguatkan *global value chains*** untuk ekonomi global yang *resilient*.



Ekonomi digital menjadi makin penting, dan dalam transisi digital harus dipastikan agar **tidak terjadi *digital divide* (leave no one behind)**.



Pentingnya **peran perempuan dan pemuda** dalam penanganan dan pemulihan pandemi, misalnya peran sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang banyak diusung oleh perempuan dan pemuda.



Kesempatan untuk **“*build back better*”**, yaitu pembangunan yang hijau dan berkelanjutan – namun perlu dicermati kemungkinan *green protectionism* oleh beberapa pihak.





Pentingnya VNR 2021

- **Voluntary National Review (VNR)** adalah proses di mana negara-negara terpilih mempresentasikan kemajuan dan tantangan dalam mencapai SDGs.
- VNR akan dipaparkan pada ***High-Level Political Forum*** sebagai wadah untuk menyajikan gambaran singkat tentang posisi negara dalam implementasi SDG, dengan tujuan untuk membantu mempercepat kemajuan melalui berbagi pengalaman, *peer-learning*, mengidentifikasi *gaps* dan *good practices*, serta membangun kemitraan.
- Kesempatan untuk memaparkan dan mempelajari langkah-langkah dalam proses pemulihan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan



*HLPF
2019



Asia Pacific Forum for Sustainable Development 2021

- Indonesia merupakan veteran VNR yang diakui secara internasional, dan akan memaparkan VNR untuk **ketiga kalinya** tahun ini.
- Indonesia telah membagikan pengalaman melalui penyampaian poin-poin terkait VNR 2021 saat ***Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)*** 2021 pada 23-26 Maret lalu.
 - Inklusivitas (*multistakeholdership*), keempat platform yaitu pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.
 - Kompilasi VNR nasional dan lokal akan diselaraskan dalam menciptakan VNR 2021 dan dimasukkan dalam RPJMN.
 - Dalam masa krisis, perlunya untuk memposisikan upaya yang lebih inovatif dan solutif, terutama terkait *means of implementation*.



Refleksi VNR 2019

- HLPF 2019 mengangkat 6 SDGs sebagai fokus pembahasannya, yaitu Goal 4, 8, 10, 13, 16, dan 17
- VNR Tahun 2019 Indonesia dengan Tema: “*Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*” menjadi salah satu perumus terbaik untuk Goal 16.
- 2019 adalah tahun signifikan dimana terdapat banyak peningkatan pada setiap SDGs dan akses data semakin terbuka di Indonesia.





Indonesia *Leading by Example*

- **Mainstreaming** - SDG telah diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 Indonesia, tema HLPF 2021 sudah selaras dengan arah pembangunan Indonesia.
- **Public Awareness** - Mengambil perspektif dari berbagai *non-state actors* dari 4 platform: pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha. Penyusunan VNR 2021 menjunjung tinggi prinsip inklusif, terbuka, partisipatif dan transparan.
- **Tata Kelola** – Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Peran penting Parlemen

- Menetapkan **penganggaran nasional / sub-nasional** dan **pemantauan tindak lanjut (*monev*)** yang memastikan pemulihan dalam kerangka SDGs.
- Menciptakan regulasi ***enabling environment*** untuk **memaksimalkan sumber pertumbuhan**, seperti ekonomi digital dan pembangunan hijau.
- Pentingnya kemitraan global – ***“no one is safe until everyone is safe”*** – sehingga penting untuk melanjutkan keterlibatan aktif DPR dalam acara SDGs internasional untuk **mendorong kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik**, di WPFSD, UNESCAP regional dan UN ECOSOC.





THANK YOU

 @pelh.kemlu

BERITA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua Panja SDGs Harap 17 Target Disosialisasikan Ke Daerah-daerah

05-04-2021 / B.K.S.A.P.



Ketua Panja Sustainable Development Goals (SDGs) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus (kiri) saat Focus Group Discussion BKSAP dengan Tema "Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic" di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2021). Foto: Ayu/Man

Ketua Panja *Sustainable Development Goals* (SDGs) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus berharap agar pemerintah dan seluruh Anggota DPR mensosialisasikan 17 target SDGs ke daerah-daerah. Dimana, Bappenas sudah menyatakan bahwa SDGs sudah masuk dan sejalan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Light

“Tinggal Parlemen melalui fungsi-fungsinya, sekaligus juga dengan pertemuan Anggota DPR RI dengan konstituennya, membawa program-program DPR dan mengawasi kinerja pemerintah, sekaligus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa kita punya target SDGs yang harus kita capai di Tahun 2030,” papar Sihar usai *Focus Group Discussion* BKSAP dengan Tema “Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2021).

Dengan kata lain, sebenarnya SDGs ini sudah dirancang sedemikian komprehensif, mulai dari titik permasalahan atau tantangan-tantangan, *action plan* nya, serta tindakan dalam mencapai target tersebut. SDGs harus dijalankan di seluruh daerah di Indonesia, untuk itu perlu sosialisasi dan partisipasi dari seluruh daerah untuk mencapai 17 target SDGs.

Dalam kesempatan itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi *toolkit* yang dibuat oleh *Project Officer Consultant* dari Inter Parliamentary Union (IPU) Isabel Obadiaru yang bisa dijadikan sebagai panduan atau *guide line*. *Self assessment* tersebut berbentuk *questioner* untuk menilai diri sendiri tentang perkembangan SDGs di Indonesia.

“Ini sangat baik untuk merefleksi apa saja yang sudah dikerjakan dalam 12 bulan sebelumnya, dan mungkin akan dikerjakan di bulan- bulan berikutnya. Bahkan ada tiga negara yang pada tahun 2018 sudah melakukan self assessment tersebut yakni Serbia, Georgia, dan Fiji,” terang Sihar.

Meski demikian, Sihar mengakui *toolkit* tersebut disusun atau dibuat sebelum terjadi pandemi Covid-19. Dengan begitu, ada sebuah kondisi yang karena pandemi Covid tidak bisa terlaksana. Artinya, ada satu urgensi bagi Indonesia untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula, bahkan mengejar ketertinggalan tersebut. Mengingat target dari SDGs itu kurang dari sepuluh tahun.

“Sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah dan DPR RI sudah membuat sebuah langkah. Misalnya membuat dua undang-undang, pertama UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional, ada juga UU Cipta Kerja. Itu adalah *tool* yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” urai Sihar.

la melanjutkan, seluruh kementerian dan lembaga pasti juga membuat program dengan pandangan atau perspektif, dimana bangsa ini masih berjuang melawan pandemi Covid-19. Tentu ada pantuan untuk memngoptimalkandan memaksimalkan kinerja. “Demikian juga dengan DPR melalui fungsi pengawasan, harus memastikan bagaimana dalam kondisi pandemi ini, program-program Kementerian bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Optimisme tersebut juga bisa terlihat dari geliat di masyarakat sudah mulai terlihat. Belanja di masyarakat sudah mulai tumbuh. Bahkan seperti dilihat bersama jalan-jalan sudah macet, berbeda dengan bulan-bulan awal saat pandemi ada. (ayu/es)



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.